

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu amanat rakyat yang dibebankan kepada instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pertanggung jawaban ini meliputi seluruh pertanggung jawaban terhadap kinerja serta pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan instansi terkait.

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Ambon adalah salah satu satuan kerja dari Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit yang merupakan salah satu unit utama dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, juga memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Laporan Kinerja ini disusun bersama oleh seluruh substansi yang berada di dalam Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Ambon. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Ambon ini tentunya masih membutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Ambon, Januari 2026

Kepala Balai,

Agung Ardyanto, SKM., M.PH

NIP. 197406181998031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dari 8 indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dijanjikan oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, 5 Indikator Kinerja Program mencapai atau melebihi target. Capaian Indikator Kinerja Program Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon Tahun 2025 yaitu:

1. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tercapai 100% dari target 100%, dengan capaian kinerja 100%.
2. Nilai Kinerja Anggaran tercapai 98,12 dari target 90 dengan capaian kinerja 109,02%.
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tercapai 97,08 dari target sebesar 95 dengan capaian kinerja 102,19%.
4. Kinerja Implementasi WBK Satker dengan capain realisasi 93,69 dari target 80 dengan capaian kinerja 117,11%.
5. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL tercapai 96,92 dari target 85 dengan capaian kinerja 114,02%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi	6
D. Sumber Daya Manusia	8
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Perencanaan Kinerja	19
B. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja	27
B. Realisasi Anggaran	68
C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Satker Setara	70
D. Analisa Realisasi Kinerja dengan Satker Setara	71
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Tindak Lanjut	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jenis Pendidikan.....	10
Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepegawaian.....	11
Tabel 1.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Bagian/ Wilayah Kerja.....	12
Tabel 1.5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Bagian/Ruang di Kantor Induk.....	13
Tabel 1.6 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Mutasi Pegawai.....	13
Tabel 1.7 Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca.....	16
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Lima Tahun	20
Tabel 2.2 Target Kinerja BKK Kelas I Ambon 2023-2025.....	24
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan BKK Kelas I Ambon Tahun 2025.....	26
Tabel 3.1 Realisasi Kinerja BKK Kelas I Ambon Tahun 2025.....	28
Tabel 3.2 Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN.....	30
Tabel 3.3 Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk.....	35
Tabel 3.4 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN.....	41
Tabel 3.5 Nilai Kinerja Anggaran.....	45
Tabel 3.6 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	51
Tabel 3.7 Kinerja implementasi WBK satker.....	55
Tabel 3.8 Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	59
Tabel 3.9 Persentase Realisasi Anggaran.....	66
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran	68
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Satker Setara.....	70

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Ambon Berdasarkan Jenis Kelamin...	9
Grafik 1.2 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Ambon Berdasarkan Umur.....	9
Grafik 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Golongan Kepangkatan.....	12
Grafik 1.4 Distribusi Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana.....	17
Grafik 1.5 Distribusi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	17
Grafik 3.1 Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN.....	31
Grafik 3.2 Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN Tahun 2022-2025	32
Grafik 3.3 Perbandingan Capaian Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN Tahun 2024 dengan Target 2025.....	32
Grafik 3.4 Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	36
Grafik 3.5 Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Tahun 2020-2024	36
Grafik 3.6 Perbandingan Capaian Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Tahun 2024 Dengan target 2024	37
Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Tahun 2024 Dengan target RAP Ditjen P2P	38
Grafik 3.8 Indeks pengendalian di Bandara/Pelabuhan/PLBDN.....	42
Grafik 3.9 Indeks pengendalian di Bandara/Pelabuhan/PLBDN Tahun 2020-2023	42
Grafik 3.10 Perbandingan Capaian Indeks pengendalian di Bandara/Pelabuhan/PLBDN Tahun 2023 dengan target tahun 2024.....	43
Grafik 3.11 Nilai Kinerja Anggaran.....	45
Grafik 3.12 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024.....	46
Grafik 3.13 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 Dengan target tahun 2024	46
Grafik 3.14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	51

Grafik 3.15 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020-2023.....	52
Grafik 3.16 Perbandingan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023 dengan target tahun 2024.....	52
Grafik 3.17 Kinerja implementasi WBK satker.....	55
Grafik 3.18 Kinerja implementasi WBK satker Tahun 2020-2024.....	56
Grafik 3.19 Perbandingan Capaian Kinerja implementasi WBK satker Tahun 2024 Dengan target tahun 2024.....	56
Grafik 3.20 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.....	63
Grafik 3.21 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Tahun 2020-2024.....	63
Grafik 3.22 Perbandingan Capaian Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Tahun 2024 dengan target kinerja tahun 2024.....	64
Grafik 3.23 Persentase Realisasi Anggaran.....	66
Grafik 3.24 Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan target tahun 2024.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Akuntabilitas kinerja menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara dan wilayah kerja, guna mencegah masuk dan keluarnya penyakit serta faktor risiko kesehatan masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut memerlukan pengelolaan program dan kegiatan yang terencana, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon atas pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025. LAKIP ini disusun sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur pedoman penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

LAKIP Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran dan pencapaian indikator kinerja utama, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi kinerja, bahan pengambilan keputusan manajerial, serta dasar perbaikan berkelanjutan

dalam rangka peningkatan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, LAKIP ini juga merupakan wujud komitmen Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas publik, serta memberikan informasi yang objektif dan akurat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja instansi dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan berbagai kebijakan strategis dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, termasuk:

- 1) Penguatan upaya promotif dan preventif dalam layanan kesehatan.
- 2) Peningkatan akses layanan kesehatan melalui digitalisasi dan inovasi teknologi.
- 3) Penanganan penyakit menular dan tidak menular secara terintegrasi.
- 4) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
- 5) Percepatan pencapaian program prioritas nasional di bidang kesehatan, seperti percepatan eliminasi stunting dan peningkatan cakupan imunisasi.

Dengan adanya perubahan nomenklatur dari Kantor Kesehatan Pelabuhan menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan akan memperkuat tugas pokok dan fungsi Kekarantinaan Kesehatan dalam menjalankan fungsi penindakan yang selama ini belum berjalan dengan baik terutama berkaitan dengan adanya pelanggaran kekarantinaan kesehatan seperti pelayaran tanpa izin, kapal asing masuk tanpa persetujuan dari BKK, kapal berlayar tanpa dokumen kekarantinaan, sampai dengan Nahkoda yang terbukti menyebarkan wabah. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dan menegakkan transformasi sistem ketahanan kesehatan untuk perubahan yang lebih baik. Meskipun mengalami perubahan nomenklatur, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon akan tetap menjadi garda terdepan untuk menangkal dan mencegah masuknya penyakit-penyakit menular terutama penyakit-penyakit yang berpotensi wabah.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit. Oleh karena itu, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon memiliki kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 yang bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian secara menyeluruh tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon.

Kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon meliputi Pengendalian Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi, Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah serta Pengendalian Risiko Lingkungan, untuk mengawasi/melindungi masuk keluarnya orang, barang dan alat angkut. Jika terdapat ancaman bahaya tersebut, maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon akan melakukan tindakan karantina atau isolasi atau tindakan lainnya dalam rangka pencegahan masuk dan keluarnya ancaman di bidang Kesehatan melalui pintu gerbang Negara untuk memperkuat Sistem Keamanan Nasional. Sehingga dapat mencegah kejadian luar biasa atau wabah atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia.

Pelabuhan dan bandara merupakan pintu masuk utama wilayah di Indonesia. Tingginya mobilitas alat angkut, barang dan pelaku perjalanan di pintu masuk memberikan risiko terhadap masuknya penyakit menular potensial wabah/kejadian luar biasa (KLB) ke wilayah. Demikian pula sebaliknya, jika di wilayah terdapat kejadian penyakit menular potensial wabah/KLB, dapat pula menular ke wilayah lain melalui pelabuhan/bandara. Berbagai penyakit menular berpotensi wabah telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, bahkan pandemi pada masa lampau, antara lain Pes, kolera, Demam Kuning, SARS, Mers-Cov, dan lain-lain.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon atas target kinerja dan penggunaan anggaran, maka disusun laporan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon. Laporan kinerja ini menjelaskan secara memadai tentang hasil analisis terhadap capaian program, permasalahan dan tantangan serta strategi pemecahan masalah.

Adapun landasan hukum disusunnya Laporan ini antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Kementerian;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No. 35 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2416/MENKES/PER/ XII/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. BKK Kelas I Ambon menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;

5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi BKK.

C. Struktur Organisasi

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, dicantumkan bahwa struktur organisasinya terdiri dari:

- a. Subbagian administrasi umum;

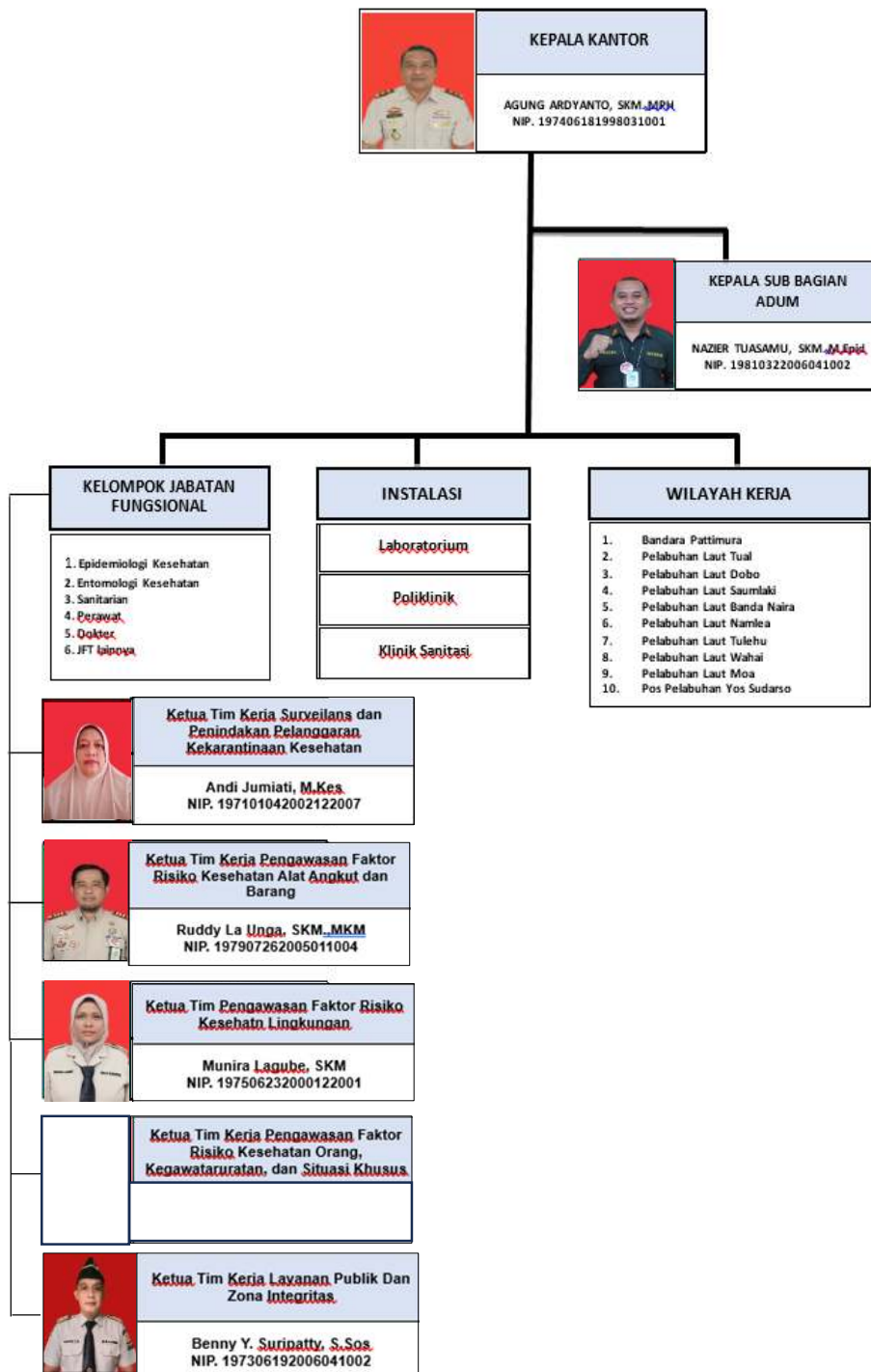
Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

- b. Kelompok jabatan fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi BKK Kelas I Ambon sebagaimana tergambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I AMBON



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKK Kelas I Ambon

D. VISI DAN MISI

Pembangunan kesehatan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan visi pembangunan kesehatan “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Sehat, Produktif, dan Berkeadilan” sebagai landasan dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kesehatan.

Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit memegang peran strategis dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, penguatan surveilans epidemiologi, serta peningkatan kesiapsiagaan dan respon terhadap kejadian luar biasa, wabah, dan kedaruratan kesehatan masyarakat. Peran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, mobilitas penduduk, serta meningkatnya risiko penularan penyakit lintas wilayah dan lintas negara.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kebijakan teknis kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara dan wilayah kerja. BKK Kelas I Ambon memiliki tanggung jawab dalam mencegah masuk dan keluarnya penyakit dan faktor risiko kesehatan melalui pelaksanaan pengawasan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan, serta penguatan surveilans kesehatan di wilayah kerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BKK Kelas I Ambon secara langsung mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, khususnya dalam pengendalian penyakit menular, deteksi dini kejadian luar biasa, serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat. Melalui pelayanan kekarantinaan kesehatan yang profesional, terintegrasi, dan akuntabel, BKK Kelas I Ambon berkontribusi nyata dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional, khususnya di wilayah Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik kepulauan dan mobilitas transportasi laut dan udara yang tinggi.

Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKK Kelas I Ambon dirancang dan dilaksanakan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029, visi dan misi Kementerian Kesehatan, serta sasaran strategis Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, guna mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan berkeadilan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020- 2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Penanggulangan Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BKK Kelas I Ambon yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan Penanggulangan penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) berperan sangat penting karena merupakan pelaksana kegiatan. Maju mundurnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia. SDM yang berkualitas akan menghasilkan kinerja yang baik bagi organisasi dan lebih mudah dalam penyesuaian terhadap setiap perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Upaya pengembangan SDM di BKK Kelas I Ambon dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Upaya ini memacu pegawai dalam meningkatkan pengetahuan serta memberikan iklim yang cukup kondusif bagi kemajuan organisasi. Berdasarkan data SIMKA pada Daftar Urut Kepangkatan (DUK) hingga bulan Desember tahun 2025, jumlah SDM BKK Kelas I Ambon tercatat memiliki 64 orang pegawai. Adapun yang menjadi Pejabat Struktural dan Tim Kerja pada BKK Kelas I Ambon tahun 2025 adalah :

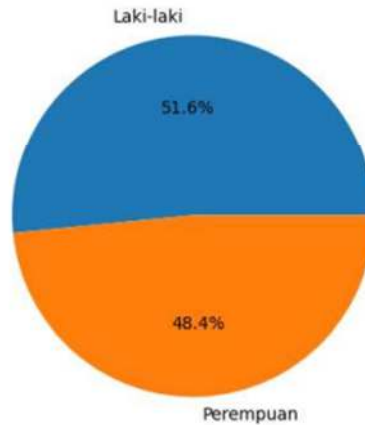
- Kepala BKK Kelas I Ambon : Agung Ardiyanto, SKM., MPH
- Kepala Sub Bagian ADUM : Nazier Tuasamu, SKM., M. Epid
- Ketua Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan : drg. Andi Jumiati, M. Kes
- Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang : Ruddy La Unga, SKM., MKM
- Ketua Tim Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan : Munira Lagube, SKM

- Ketua Tim Kerja Pengawasan
Faktor Risiko Kesehatan Orang,
Kegawataruratan,
dan Situasi Khusus : -
- Ketua Tim Kerja Layanan Publik
Dan Zona Integritas : Benny Y. Suripatty, S.Sos

Distribusi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan, Golongan Kepangkatan, Bagian/Substansi/Wilayah Kerja, dll dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 1.1 Distribusi Pegawai BKK Kelas I Ambon Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



Berdasarkan grafik 1.1 terlihat bahwa jumlah pegawai BKK Kelas I Ambon sampai dengan tahun 2025 terdiri dari dua kelompok jenis kelamin, yaitu pegawai laki-laki dan perempuan. Pegawai laki-laki memiliki proporsi sebesar 51,6%, sedangkan pegawai perempuan sebesar 48,4%. Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi pegawai antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, dengan jumlah pegawai laki-laki sedikit lebih dominan dibandingkan pegawai perempuan. Hal ini mencerminkan adanya keseimbangan gender dalam struktur kepegawaian di lingkungan Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Ambon.

b. Berdasarkan Pendidikan

Grafik 1.2
Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon
Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3 (Doktor)	0
2	S2 (Magister)	7
3	S1 (Sarjana / Profesi / Ners)	31
4	D IV / S.Tr	1
5	D III	23
6	SLTA	2
Total	Keseluruhan	64 Pegawai

Berdasarkan Grafik 1.2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Ambon tahun 2025 didominasi oleh pegawai dengan pendidikan S1 (Sarjana/Profesi/Ners), yaitu sebanyak 31 orang. Selanjutnya, pegawai dengan pendidikan D III berjumlah 23 orang, dan S2 (Magister) sebanyak 7 orang. Sementara itu, pegawai dengan pendidikan D IV/Sarjana Terapan berjumlah 1 orang dan SLTA sebanyak 2 orang. Adapun pegawai dengan tingkat pendidikan S3 (Doktor) belum ada. Secara keseluruhan, jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebanyak 64 orang.

c. Berdasarkan Golongan/Kepangkatan Kepegawaian

Tabel 1.3 Distribusi Golongan dan Kenaikan Pangkat 2025 BKK Kelas I Ambon

No	Golongan	Tahun 2025 (Jumlah)	Presentase (%)
1	II.d	1 orang	11,11 %
2	III.b	2 orang	22,22 %
3	III.c	4 orang	44,44 %
4	III.d	2 orang	22,22 %
Total		9 orang	100
			101

Berdasarkan Tabel 1.3 Distribusi Golongan dan Kenaikan Pangkat Tahun 2025 di BKK Kelas I Ambon, diketahui bahwa jumlah pegawai yang mengalami kenaikan pangkat sebanyak 9 orang. Golongan dengan jumlah terbanyak adalah III.c yaitu sebanyak 4 orang atau sebesar 44,44% dari total pegawai yang naik pangkat. Selanjutnya, golongan III.b dan III.d masing-masing berjumlah 2 orang dengan persentase sebesar 22,22%. Sementara itu, golongan II.d merupakan golongan dengan jumlah paling sedikit, yaitu 1 orang atau sebesar 11,11%. Secara keseluruhan, distribusi kenaikan pangkat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada golongan III, yang mencerminkan dominasi jenjang karier menengah dalam struktur kepegawaian BKK Kelas I Ambon pada tahun 2025.

d. Berdasarkan Kenaikan Jabatan

Tabel 1.4 Distribusi Kenaikan Jabatan 2025 Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Ambon

NO	NAMA	JABATAN SEBELUMNYA	JABATAN SESUDAH	TMT
1.	ASMAWATI TUASIKAL, S.KEP	PERAWAT MAHIR	PERAWAT PENYELIA	01 MEI 2025

Berdasarkan Tabel 1.4 Distribusi Kenaikan Jabatan Tahun 2025 di Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Ambon, pada tahun 2025 terdapat satu orang pegawai yang memperoleh kenaikan jabatan fungsional. Pegawai tersebut adalah Asmawati Tuasikal, S.Kep. yang sebelumnya menduduki jabatan Perawat Mahir dan kemudian naik jabatan menjadi Perawat Penyelia dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Januari 2025. Kenaikan jabatan ini mencerminkan pengakuan atas kompetensi, kinerja, serta pengalaman yang bersangkutan, sekaligus menunjukkan komitmen instansi dalam mendorong pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Ambon.

2. Sarana Dan Prasarana

a. Gedung

Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan penunjang utama bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Guna menjamin keberhasilan kegiatan tersebut BKK Kelas I Ambon tercatat memiliki 3 (tiga) buah gedung Kantor, yang berdiri pada tahun 1982 seluas 70 M², tahun 2001 seluas 696 M² yang berdiri diatas tanah milik PT. Pelindo IV Cabang Ambon dan tahun 2018 seluas 1.116 M² yang berdiri diatas tanah milik BKK Kelas I Ambon serta memiliki 1 (satu) rumah dinas namun dalam kondisi rusak berat. Untuk wilayah kerja (WILKER), BKK Kelas I Ambon memiliki gedung dengan status Hak Milik diantaranya, Wilker Tual memiliki gedung Kantor seluas 72 M² yang berdiri diatas tanah Kantor Pelabuhan Tual, dan Rumah dinas seluas 56 M², serta Wilker Saumlaki memiliki gedung dengan luas 70 M² yang berdiri diatas tanah milik pemerintah daerah setempat.

b. Poliklinik

BKK Kelas I Ambon memiliki 5 unit ruangan poliklinik pada Pos Pelabuhan Yos Sodarso Ambon, Kantor Induk BKK Ambon, Wilker Bandara Pattimura dan Wilker Pelabuhan Tual, Wilker Pelabuhan Tulehu) yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi penumpang, ABK dan masyarakat pekerja di sekitar pelabuhan/bandara.

c. Laboratorium

BKK Kelas I Ambon juga laboratorium untuk melakukan pemeriksaan fisik, kimia, dan bakteriologi sederhana sampel air bersih dan makanan. Laboratorium BKK Kelas I Ambon juga dilengkapi dengan peralatan seperti; Incubator, Mikroskop, Fild Filtration Kit, Colorimeter, Lemari Es, Water Test Kit Standard dan lain-lain.

d. Kendaraan Operasional

Sarana lainnya untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan, BKK Kelas I Ambon memiliki kendaraan operasional roda 4 (empat) sebanyak 11 (sebelas) unit terdiri dari 8 (delapan) unit mobil ambulance, 1 (satu) unit mobil vektor control dan 1 (satu) unit mobil derek (ranger), 1 (satu) unit bus, dimana sebanyak 7 (tujuh) unit kendaraan operasional tersebut di sebar pada Kantor Induk/Pos Pelabuhan Yos Sudarso dan 4 (empat) unit masing-masing tersebar di wilayah kerja Bandara Pattimura Ambon, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Saumlaki). Sedangkan kendaraan operasional roda 2 (dua) berjumlah 14 (empat belas) unit, dimana kendaraan operasional tersebut tersebar pada wilayah kerja sebanyak 8 (delapan) unit antara lain di Wilker Bandara Pattimura Ambon, Wilker Tulehu, Wilker Namlea, Wilker Bula, Wilker Banda, Wilker Tual, Wilker Dobo, Wilker Saumlaki, sedangkan di Kantor Induk 6 (enam) Unit. Selain kendaraan operasional BKK Kelas I Ambon juga memiliki 2 (dua) unit mobil jabatan kepala BKK dan Ka.Sub Adum.

e. Alat Penunjang Lainnya

Selain itu BKK Kelas I Ambon memiliki 15 unit Laptop dan 15 Unit Komputer/ PC dengan Kondisi baik. Untuk mendukung kegiatan Teknis/Operasional BKK Kelas I Ambon juga memiliki 6 buah *Handy Talky*, 1 unit kamera Digital, dan 1 unit *Handy Cam*, 1 Unit alat komunikasi radio VHF, dan 1 unit alat surveilans (*Boarding Kit*) dan seluruhnya masih dalam kondisi Baik.

Tabel 1.7
Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per 31 Desember 2025
Pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	804,503,478
117199	Persediaan Lainnya	232,549,450

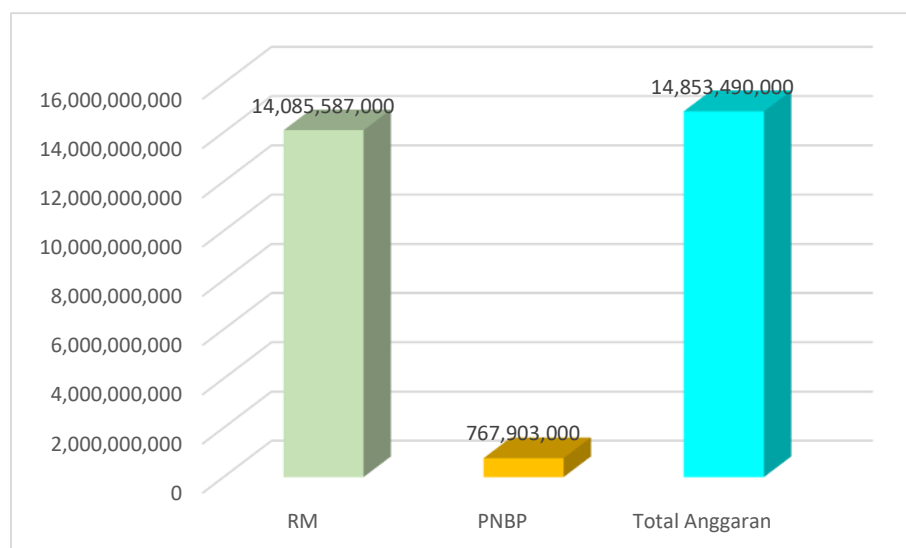
131111	Tanah	3.973.337.400
132111	Peralatan dan Mesin	24,130,755,227
133111	Gedung dan Bangunan	13.717.333.928
134113	Jaringan	313.377.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(21.453.973.227)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,325.332.881)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(75.118.611)
TOTAL		19.340.431.764

Sumber : Data BMN BKK Ambon, 2024

3. Anggaran (Dana)

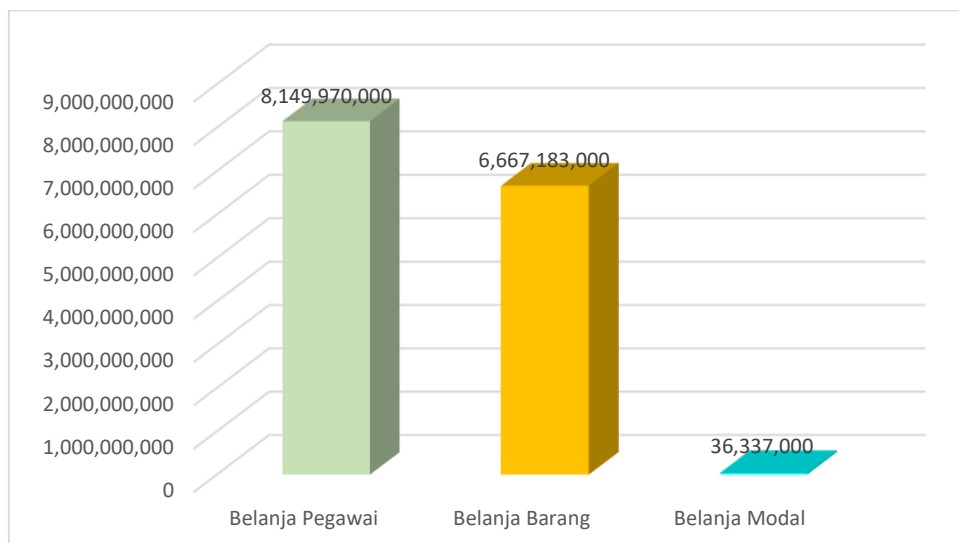
Penyelenggaraan kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon yang tertuang dalam pagu anggaran belanja DIPA/RKAKL Tahun 2025 Nomor : DIPA-024.05.2.416010/2025 sebesar Rp.**14.853.490.000,-** dari anggaran tersebut bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 14.085.587.000,- dan PNPB BKK Kelas I Ambon sebesar Rp. 767.903.000,-. Pembagian alokasi anggaran belanja BKK Kelas I Ambon berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 1.4
Distribusi Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
Pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon
Tahun 2025



Pembagian alokasi anggaran belanja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon berdasarkan sumber dana dari total pagu anggaran 2025 adalah Rp. **14.853.490.000,-** diantaranya adalah Belanja Pegawai sebesar Rp.8.149.970.000, Belanja Barang sebesar Rp.6.667.183.000, dan Belanja Modal sebesar Rp.36.337.000, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 1.5
Distribusi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon
Tahun 2025



RKAKL BKK Kelas I Ambon Tahun 2025 mengalami 8 (delapan) kali revisi, dengan anggaran sebesar Rp. 14.981.691.000. Tata cara revisi anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2025. Revisi yang dilakukan untuk menyesuaikan perubahan Rencana Penarikan Dana melalui Revisi Halaman III DIPA maupun revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran yang dilakukan melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) guna memaksimalkan penyerapan anggaran dan optimalisasi sisa anggaran kegiatan.

F. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan Laporan
Kinerja BKK Kelas II Ambon Tahun 2025:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Tindak Lanjut

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam sistem Akuntabilitas.

Perencanaan kinerja merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam penyusunan perencanaan kinerja terdiri atas tiga instrumen yaitu : Rencana Aksi Kegiatan (RAK), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Kinerja terdapat perjanjian kinerja yang merupakan tekad dan janji, rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran berbagai upaya untuk mencapai Visi, Misi, Sasaran Kegiatan, Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana jangka menengah pada level Satker yaitu Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2025 s.d 2029, yang diharapkan akan menjadi pedoman dalam upaya mencapai target kinerja pada hingga akhir masa pelaksanaan jangka menengah di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon.

1. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025-2029

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025 s.d 2029 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon hingga Triwulan IV Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan menunggu penetapan Rencana Aksi Program Tahun 2025 s.d 2029 yang juga masih dalam proses penyusunan. Namun, pada hakekatnya Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025 – 2025 merupakan pernyataan komitmen

bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana / prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktifitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Sebagai wujud kesinambungan, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi di bidang kesehatan yaitu “Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045” dan Misi Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025 s.d 2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas)”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025 – 2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025 s.d 2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
- b. Membudayakan gaya hidup sehat
- c. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
- d. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive.
- e. Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
- f. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
- g. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

Untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit akan menjabarkan dalam visi dan misi penanggulangan penyakit yang saat ini masih dalam tahap penetapan dan

penyusunan Rencana Aksi Program Tahun 2025 s.d 2029.

Selaras nantinya dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Balai Kekarantinaan Kesehatan akan menjabarkan visi dan misi Balai Kekarantinaan Kesehatan yang saat ini masih dalam tahap penetapan dan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025 s.d 2029. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit akan melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung peningkatan sistem ketahanan kesehatan melalui penanggulangan penyakit di pintu masuk negara.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Lima Tahun

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I

Ambon Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara yang dikendalikan	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
	2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai Kinerja Anggaran	90	90	90	90	90
	5. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran	95	95	95	95	95
	6. Kinerja Implementasi WBK Satker	80	80	80	80	80
	7. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	85%	85%	85%	85%	85%
	8. Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%	96%

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon merupakan dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon dengan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon pada tahun 2025. Penetapan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon disusun berdasarkan dokumen Rencana Aksi Kegiatan BKK Kelas I Ambon tahun 2025-2029 yang setiap tahunnya dirumuskan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan diselenggarakan dalam DIPA dan RKA-KL Tahun 2025. Penetapan Kinerja BKK Kelas I Ambon 2024 telah disusun, didokumentasikan dan ditetapkan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon pada awal tahun 2025 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun 2025. Target-target kinerja sasaran program yang ingin dicapai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon dalam dokumen Penetapan Kinerja BKK Kelas I Ambon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon
Tahun 2025

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko Penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0.93
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0.93
2	Meningkatnya	4	Nilai kinerja anggaran	90

	dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Penanggulangan Penyakit	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95
		6	Kinerja implementasi WBK satker	80
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85
		8	Persentase realisasi anggaran	96

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon Tahun 2025 disusun berdasarkan data pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran selama satu tahun anggaran dengan kegiatan manajemen pelaksanaan tugas teknislainnya. Data dimaksud diuraikan dalam pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran pada tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan diperoleh melalui perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) setiap indikator kinerja, baik input maupun output yaitu membandingkan data rencana tingkat capaian (target) dengan data realisasi, baik jumlah anggaran maupun jumlah satuannya. Sedangkan pengukuran pencapaian sasaran diukur melalui survei dan biasanya dilakukan berdasarkan interval waktu tertentu yang disesuaikan dengan jenis penyakit serta perkiraan waktu keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon khususnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon dalam rumusan yang lebih terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Organisasi yang telah ditetapkan. Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah meningkatnya pelaksanaan kegiatan dalam bidang pencegahan masuk keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di

wilayah kerja pelabuhan dan lintas batas serta pengendalian dampak risiko lingkungan.

Realisasi kinerja BKK Kelas I Ambon dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon
Tahun 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Bandara/Pelabuhan/PLBDN dan Wilayah	1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0,93	0.88	94.62
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100	100	100,00
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0,93	0.88	94.62
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Penanggulangan Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	90	98.12	109.02
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	97.08	102.19
		6. Kinerja implementasi WBK satker	80	93.69	117.11
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85	96.92	114.02
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96	80.30	83.65
Rata-rata Capaian			68,48	70.98	101.91

Berdasarkan tabel 3.1 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon menetapkan dua sasaran kegiatan utama yang mendukung Program Penanggulangan Penyakit, yaitu peningkatan pelayanan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara dan peningkatan dukungan manajemen serta pelaksanaan

tugas teknis lainnya. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan pertama, yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan kesehatan di bandara, pelabuhan, PLBDN, dan wilayah, diukur melalui tiga indikator kinerja. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN mencapai nilai 0,88 dari target 0,93, dengan capaian kinerja sebesar 94,62 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya deteksi dini terhadap faktor risiko penyakit di pintu masuk negara telah dilaksanakan secara optimal, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas dan cakupan pemeriksaan.

Selanjutnya, indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan mencapai target maksimal sebesar 100 persen. Capaian ini mencerminkan keberhasilan BKK Kelas I Ambon dalam melaksanakan fungsi pengendalian faktor risiko secara menyeluruh dan konsisten sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Sementara itu, Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN juga mencapai nilai 0,88 dari target 0,93, dengan capaian kinerja sebesar 94,62 persen, yang menunjukkan efektivitas pengendalian faktor risiko penyakit di wilayah kerja.

Sasaran kegiatan kedua, yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Penanggulangan Penyakit, menunjukkan capaian yang sangat baik. Nilai kinerja anggaran mencapai 98,12 dari target 90 atau sebesar 109,02 persen, yang mengindikasikan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) juga melampaui target dengan capaian 97,08 dari target 95 atau sebesar 102,19 persen, mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang tertib.

Selain itu, kinerja implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja mencapai nilai 93,69 dari target 80, dengan capaian kinerja sebesar 117,11 persen. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dari aspek pengembangan sumber daya manusia, persentase ASN yang ditingkatkan

kompetensinya mencapai 96,92 persen dari target 85 persen, dengan capaian kinerja sebesar 114,02 persen, yang menggambarkan keberhasilan upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur.

Namun demikian, indikator persentase realisasi anggaran menunjukkan capaian sebesar 80,30 persen dari target 96 persen, dengan capaian kinerja sebesar 83,65 persen. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyesuaian pelaksanaan kegiatan, perubahan kebijakan, serta keterbatasan waktu pelaksanaan pada akhir tahun anggaran, sehingga tidak seluruh anggaran dapat direalisasikan secara optimal.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja BKK Kelas I Ambon pada Tahun 2025 mencapai 101,91 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum berjalan sangat baik dan mampu melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini menjadi dasar untuk mempertahankan kinerja yang telah baik sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek optimalisasi realisasi anggaran dan peningkatan kualitas layanan kekarantinaan kesehatan.

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN

a. Defenisi operasional

Mengukur kinerja deteksi dini faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN. Data diperoleh dari pengukuran 4 parameter yakni:

- 1) Persentase orang yang diperiksa sesuai standar
- 2) Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar
- 3) Persentase barang diperiksa sesuai standar
- 4) Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

b. Cara perhitungan

Hitung capaian 4 parameter (orang, alat angkut, barang dan lingkungan), kemudian hasil hitungan dimasukkan dalam rumus indeks. Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal).

c. Upaya kegiatan

Upaya kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan orang adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan screening penyakit TB, HIV, dan Malaria.
- 2) Melakukan vaksinasi dan menerbitkan ICV bagi pelaku perjalanan yang akan keluar negeri.
- 3) Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pasien kunjungan poliklinik.

Upaya kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan alat angkut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan serta pengawasan hygiene sanitasi kapal guna penerbitan COP, PHQC, maupun Gendec baik itu kapal yang berasal dari daerah terjangkit maupun daerah tidak terjangkit dari luar negeri maupun dalam negeri.

Upaya kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan barang adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksian terhadap jenazah dan perabuan sesuai dengan UU Kekearantinaan nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, baik itu proses keberangkatan jenazah yang masuk melalui pelabuhan dan Bandar udara dan yang melalui proses kedatangan pelabuhan dan Bandar udara.

Upaya kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan sanitasi Tempat Pengolahan Pangan.
- 2) Pemeriksaan Sarana Penyediaan Air Bersih
- 3) Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum
- 4) Pengamatan Vektor penyakit.

d. Capaian indikator

Hasil akumulasi pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang serta lingkungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon
Tahun 2025

Baseline	target	Capaian	
		Total	%
Jumlah Pemeriksaan Orang (rekap laporan harian, data poliklinik, ICV, pemeriksaan HIV/TB/Malaria) ==> dihitung kumulatif Jan-Desember	3,834,267	4,502,177	117.42%
Rekap laporan harian jumlah pnp dtg/brgkt kapal pesawat ABK	3,828,009	4,488,126	117.24%
Data poliklinik	5,004	12,182	243.45%
Pemeriksaan HIV	150	205	136.67%
Pemeriksaan TB	300	531	177.00%
Pemeriksaan Malaria	0	-	#DIV/0!
ICV	804	1,133	140.92%
Jumlah Pemeriksaan Alat Angkut (COP, PHQC, Gendec)	19,919	17,304	86.87%
COP	202	213	105.45%
PHQC	19,705	17,079	86.67%
Gendec	12	12	100.00%
Jumlah Pemeriksaan Barang (jenazah)	435	411	94.48%
Jumlah Pemeriksaan Lingkungan (TPP, air, ISPAP, TTU, vektor)	3,707	5,023	135.50%
TPP	504	588	116.67%
Air	732	1,988	271.58%
ISPAP	1,032	1,290	125.00%
TTU	996	733	73.59%
Vektor	443	424	95.71%
Indeks	0.93	0.88	94.62%

Berdasarkan Tabel 3.2, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon Pengukuran Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN Tahun 2025 menunjukkan capaian 0,88 dari target 0,93, dengan tingkat pencapaian 94,62%. Capaian ini didukung oleh kinerja pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan yang secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

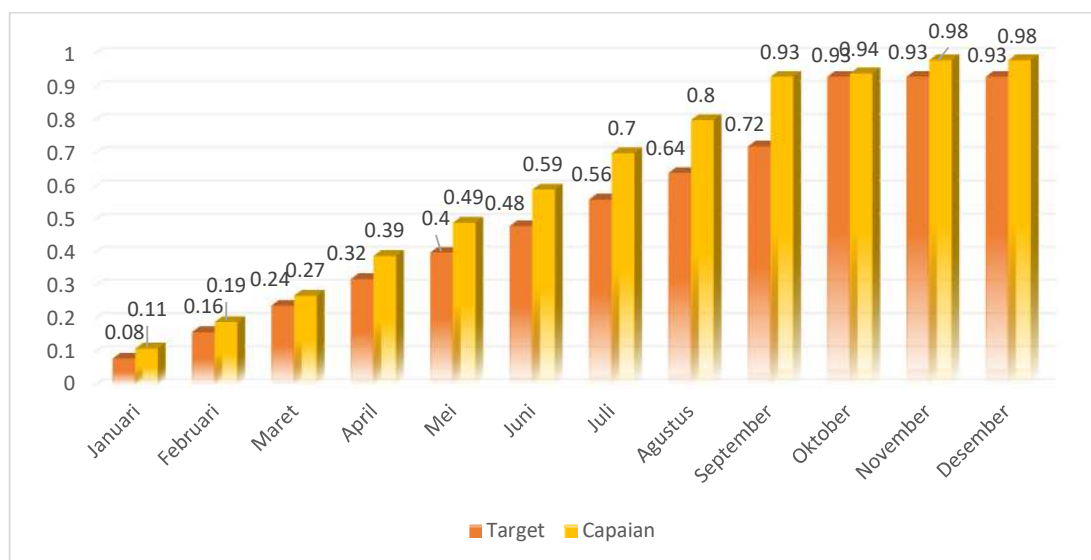
Pemeriksaan orang secara kumulatif mencapai 4.502.177 pemeriksaan atau 117,42% dari baseline. Peningkatan ini terutama didorong oleh tingginya mobilitas penumpang dan awak alat angkut,

peningkatan layanan poliklinik (243,45%), pemeriksaan HIV (136,67%), TB (177,00%), serta penerbitan ICV (140,92%).

Pemeriksaan alat angkut mencapai 17.304 pemeriksaan atau 86,87%, dengan capaian COP sebesar 105,45%, PHQC 86,67%, dan Gendec 100%. Pemeriksaan barang (jenazah) mencapai 94,48%, sedangkan pemeriksaan lingkungan menunjukkan capaian tinggi sebesar 135,50%, khususnya pada pemeriksaan kualitas air (271,58%) dan ISPAP (125,00%). Namun demikian, pemeriksaan TTU (73,59%) dan vektor (95,71%) masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dini faktor risiko kesehatan di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon telah berjalan efektif, meskipun diperlukan penguatan pada beberapa komponen agar target indeks dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya.

**Grafik 3.1 Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN
BKK Kelas I Ambon Tahun 2024**



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

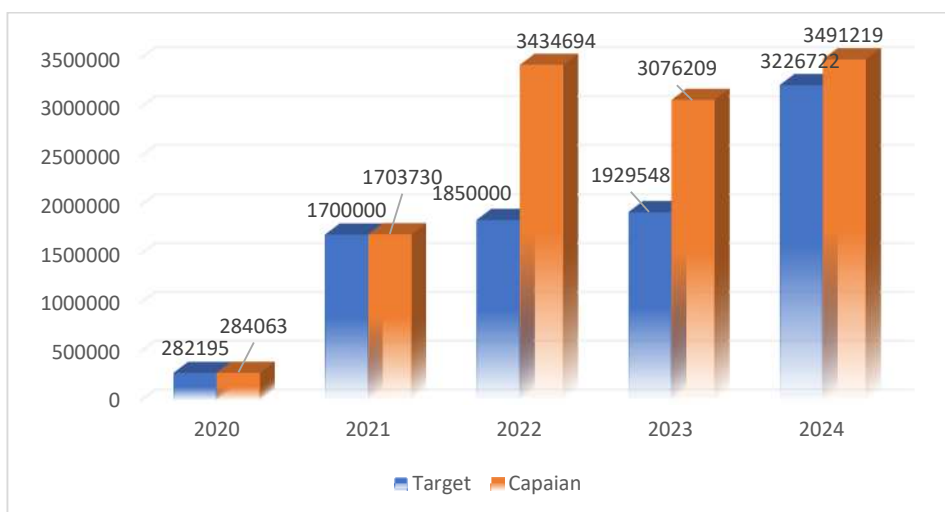
Berdasarkan Grafik 3.1, capaian Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon Tahun 2024 menunjukkan tren yang konsisten dan positif

sepanjang tahun. Pada awal tahun, capaian berada di bawah target, seperti bulan Januari dengan nilai capaian 0,08 dibandingkan target 0,11. Namun, mulai bulan April hingga Desember, capaian terus meningkat dan berhasil melampaui target.

Peningkatan signifikan terlihat mulai bulan Mei dengan capaian 0,48 (melebihi target 0,39) hingga puncaknya pada bulan Desember dengan capaian 0,98, sesuai target yang ditetapkan. Performa terbaik terlihat pada kuartal terakhir (Oktober–Desember), di mana capaian konsisten mencapai target 0,93–0,98, mencerminkan keberhasilan optimal dalam implementasi program deteksi faktor risiko.

Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan deteksi faktor risiko di wilayah kerja, dengan tetap mempertahankan tren capaian yang stabil dan melampaui target yang telah ditetapkan pada akhir tahun.

**Grafik 3.2 Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN
BKK Kelas I Ambon Tahun 2020-2024**



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.2, tren capaian Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon selama periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, capaian hanya sebesar 282.195, sedikit di bawah target 284.063. Pada tahun 2021, capaian meningkat menjadi

1.700.000, berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 1.703.730 dengan capaian mendekati 100%.

Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2022, di mana capaian mencapai 3.434.694, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 1.929.548. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 3.076.209, lebih tinggi dari target 1.929.548.

Puncak capaian terjadi pada tahun 2024 dengan angka capaian sebesar 3.491.219, yang sekali lagi berhasil melampaui target sebesar 3.226.722.

Grafik ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program deteksi faktor risiko yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan efektivitas strategi dan upaya peningkatan kinerja oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon.

Grafik 3.3 Perbandingan Capaian Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN Tahun 2024 dan target Tahun 2025
BKK Kelas I Ambon



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.3, terlihat perbandingan antara capaian Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN pada tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon.

Pada tahun 2024, capaian indeks deteksi faktor risiko berada pada angka 0,98, yang melebihi target tahun 2025 sebesar 0,93. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2024 telah melampaui standar yang diharapkan untuk tahun berikutnya, mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan deteksi faktor risiko.

Capaian ini menggambarkan efektivitas strategi dan program yang telah diterapkan, sekaligus memberikan optimisme bahwa target tahun 2025 dapat dicapai atau bahkan dilampaui dengan upaya yang konsisten.

e. Masalah

Beberapa masalah yang ditemukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat pelaku perjalanan yang tidak melaporkan kondisi kesehatannya secara jujur sebelum keberangkatan, terutama pada pelabuhan kecil.
- 2) Tingginya angka populasi lalat di sekitar pelabuhan akibat sanitasi lingkungan yang kurang terjaga.
- 3) Belum optimalnya pelaporan terkait penyakit menular tertentu, seperti malaria, oleh pelaku perjalanan maupun operator transportasi.

f. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menerapkan SOP baru bersama operator kapal/pesawat, yang mengharuskan pelaku perjalanan melaporkan kondisi kesehatan sebelum pembelian tiket melalui aplikasi digital.
- 2) Melakukan spraying di area pelabuhan yang menjadi lokasi berkumpulnya lalat untuk mengendalikan populasi.
- 3) Memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, operator transportasi, dan agen perjalanan untuk meningkatkan pelaporan penyakit menular secara real-time.

g. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunnya risiko penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh pelaku perjalanan melalui sistem pelaporan yang lebih baik.
- 2) Berkurangnya populasi lalat di sekitar pelabuhan, sehingga mengurangi risiko transmisi penyakit yang ditularkan melalui vektor.
- 3) Peningkatan pengawasan hygiene sanitasi alat angkut yang berdampak pada terciptanya lingkungan perjalanan yang lebih sehat dan aman.
- 4) Penguatan jejaring kerja lintas sektor untuk mendeteksi penyakit secara cepat, sehingga dapat segera dilakukan pencegahan dan penanganan.

h. Analisis keberhasilan

Keberhasilan pada tahun 2024 diukur berdasarkan:

- 1) Penurunan indeks populasi lalat di pelabuhan sebesar 30% setelah dilakukan pengendalian vektor.
- 2) Peningkatan deteksi penyakit menular pada pelaku perjalanan hingga 40% melalui skrining kesehatan.
- 3) Tercapainya target jejaring kerjasama dengan lintas sektor untuk memantau dan menangani faktor risiko kesehatan di Bandara/Pelabuhan/PLBDN.

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

a. Defenisi operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun.

b. Cara perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%.

c. Upaya kegiatan

Berikut merupakan upaya kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian faktor risiko di BKK Kelas I Ambon:

- 1) Melakukan screening pelaku perjalanan dengan suhu tinggi $>37,5^{\circ}\text{C}$, saturasi <95 , hamil <12 minggu dan >32 , dan hb $<8,5$.
- 2) Melakukan screening HIV/TB/Malaria di wilayah kerja BKK Kelas I Ambon.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan baik itu embarkasi maupun debarkasi.
- 4) Melaksanakan desinfeksi pada alat angkut, orang, barang serta lingkungan yang terkontaminasi.
- 5) Melaksanakan kegiatan pengasapan atau fogging, spraying IRS (lalat dan nyamuk) pada daerah buffer dan perimeter wilayah pelabuhan dan bandara udara.
- 6) Melaksanakan kegiatan inspeksi sanitasi pada TTU, TPM serta Sarana Air bersih.
- 7) Kegiatan pengendalian vektor Malaria, DBD, Diare, PES pada bandara serta wilayah pelabuhan BKK Kelas I Ambon.

8) Capaian indikator

Capaian indikator Faktor Risiko yang dikendalikan terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon
Tahun 2024

Parameter Pemeriksaan	Capaian 2024		
	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR dikendalikan	Persentase FR yang dikendalikan $(4/3)*100$
Pemeriksaan orang	4124	4124	100
Pemeriksaan alat angkut	15	15	100
Pemeriksaan barang	0	0	0
Pemeriksaan Lingkungan	23	23	100
Total	4162	4162	100

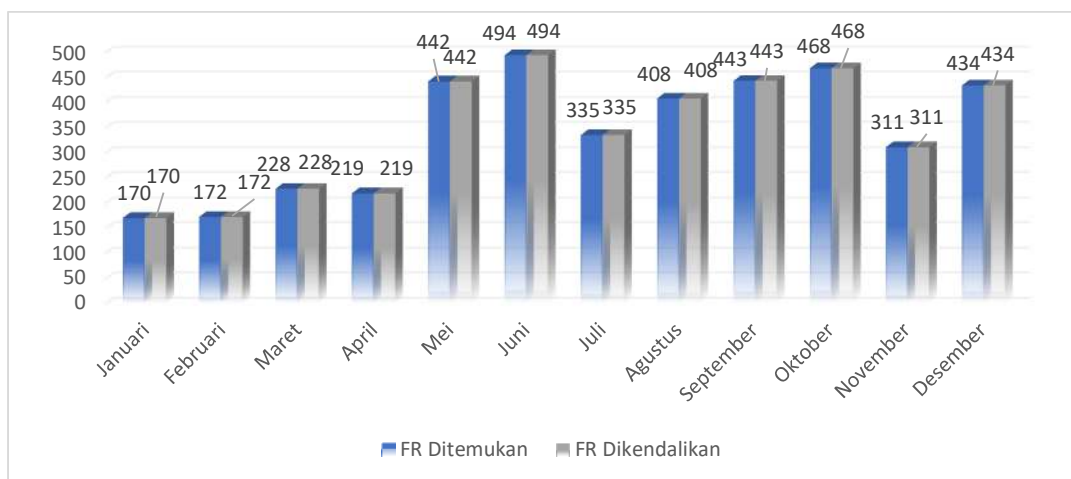
Berdasarkan Tabel 3.3, capaian pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon Tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan persentase capaian sebesar 100% untuk seluruh parameter pemeriksaan.

Pada pemeriksaan orang, ditemukan 4.124 faktor risiko yang seluruhnya berhasil dikendalikan. Demikian pula pada pemeriksaan alat angkut, dari 15 faktor risiko yang ditemukan, semuanya berhasil dikendalikan. Pemeriksaan lingkungan juga menunjukkan keberhasilan serupa, dengan 23 faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan sepenuhnya. Sementara itu, tidak ditemukan faktor risiko pada pemeriksaan barang, yang menegaskan situasi yang terkendali pada parameter tersebut.

Keberhasilan ini mencerminkan tren pelaksanaan kegiatan pengendalian yang konsisten dan optimal sepanjang tahun. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program kekarantinaan kesehatan dalam mencegah masuk dan tersebarnya penyakit menular, sekaligus membuktikan komitmen Balai Kekarantinaan Kesehatan

Kelas I Ambon untuk menjaga perlindungan kesehatan di wilayah pintu masuk.

Grafik 3.4 Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
BKK Kelas I Ambon Tahun 2024



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.4, persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon pada tahun 2024 menunjukkan tren yang konsisten dan positif sepanjang tahun. Jumlah faktor risiko yang ditemukan selalu sebanding dengan jumlah faktor risiko yang berhasil dikendalikan setiap bulannya, dengan tingkat pengendalian mencapai 100%.

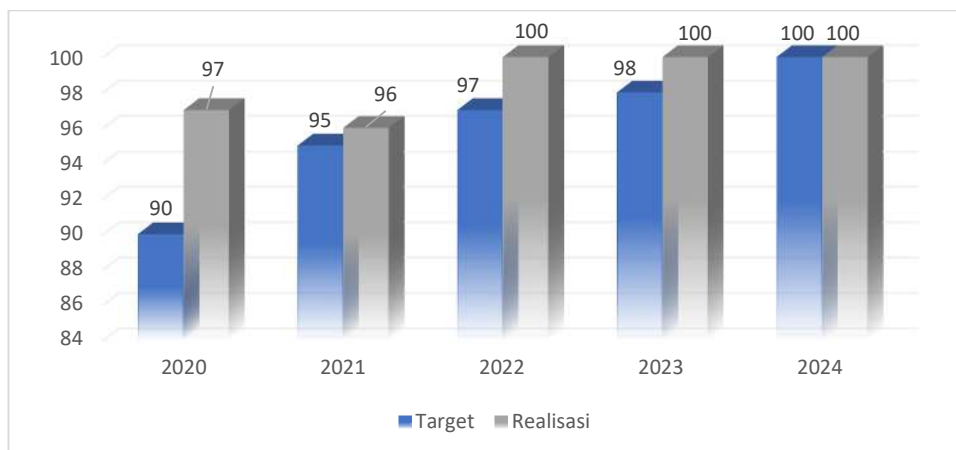
Pada awal tahun, jumlah faktor risiko yang ditemukan masih relatif rendah, seperti pada bulan Januari sebanyak 170 kasus, yang seluruhnya berhasil dikendalikan. Tren peningkatan terlihat mulai bulan April hingga Juni, dengan puncak jumlah faktor risiko ditemukan dan dikendalikan pada bulan Juni sebanyak 494 kasus.

Setelah bulan Juni, terjadi penurunan jumlah faktor risiko yang ditemukan, seperti pada bulan Juli (335 kasus) dan Agustus (408 kasus), tetapi pengendalian tetap optimal di angka 100%. Performa yang stabil terus berlanjut hingga kuartal terakhir, dengan jumlah faktor

risiko tertinggi kembali tercatat pada bulan Oktober sebanyak 468 kasus, dan jumlah ini sepenuhnya berhasil dikendalikan.

Keberhasilan pengendalian faktor risiko sepanjang tahun mencerminkan efektivitas pelaksanaan program kekarantinaan kesehatan di wilayah pintu masuk. Hal ini menunjukkan komitmen Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon dalam menjaga keamanan kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit menular.

Grafik 3.5 Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
BKK Kelas I Ambon Tahun 2020-2024



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

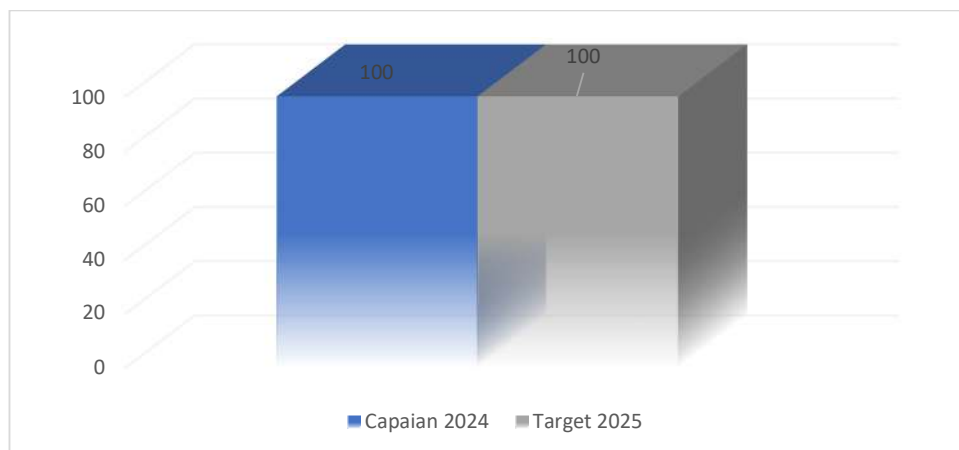
Berdasarkan Grafik 3.5, persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang berhasil dikendalikan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024.

Pada tahun 2020, capaian realisasi berada di angka 97%, diatas target sebesar 90%. Pada tahun 2021, target capaian meningkat menjadi 95%, dengan realisasi sebesar 96%.

Peningkatan performa terus terlihat pada tahun 2022, di mana capaian realisasi mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 97%. Tren capaian optimal ini berhasil dipertahankan pada tahun 2023 dan 2024, dengan realisasi yang konsisten mencapai 100%, melebihi target masing-masing sebesar 98% dan 100%.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pengendalian faktor risiko penyakit oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon. Peningkatan capaian dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas kekarantinaan kesehatan, menjaga keamanan kesehatan di wilayah pintu masuk, dan mencegah penyebaran penyakit menular.

Grafik 3.6 Perbandingan Capaian Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Tahun 2024 dengan Target Tahun 2025
BKK Kelas I Ambon



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.6, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon berhasil mencapai persentase pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian ini sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun tersebut dan bahkan sama dengan target yang direncanakan untuk tahun 2025, yaitu 100%.

Hal ini mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan program pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan. Keberhasilan mencapai target tahun 2024 sekaligus menunjukkan kesiapan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon untuk mempertahankan kinerja optimal pada tahun mendatang, guna

mendukung upaya pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit menular di wilayah kerja.

Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Tahun 2024 dengan Target RAP Ditjen P2P

BKK Kelas I Ambon



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.7, capaian pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon pada tahun 2024 berhasil mencapai angka 100%. Capaian ini sesuai dengan target RAP Ditjen P2P untuk tahun tersebut, yang juga sebesar 100%.

Keselaran antara capaian 2024 dengan target Ditjen P2P menunjukkan komitmen Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon dalam mendukung kebijakan nasional untuk mencegah masuknya penyakit menular melalui pintu masuk negara. Keberhasilan ini mencerminkan pelaksanaan program yang efektif dan konsisten sesuai dengan pedoman dan target yang telah ditetapkan. Hal ini juga memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan kinerja optimal di tahun-tahun mendatang.

d. Masalah

- 1) Kondisi iklim yang tidak menentu sehingga berpengaruh pada tingkat kepadatan vektor di beberapa titik.

- 2) Keterbatasan tenaga pada wilayah kerja sehingga dapat berpengaruh pada kegiatan pengendalian faktor risiko pada lingkungan.
- 3) Pengendalian pada kategori barang tetap memerlukan persiapan untuk menghadapi potensi kasus di masa depan, seperti pengiriman jenazah dengan risiko penyakit menular.

e. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan simulasi penanganan faktor risiko pada barang untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas terhadap potensi kasus di masa depan.
- 2) Mengadakan pelatihan rutin bagi petugas di wilayah kerja (wilker) terkait prosedur pengendalian faktor risiko pada barang.
- 3) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan bea cukai, operator kapal/pesawat, dan Dinas Kesehatan untuk memperkuat pengawasan barang yang berpotensi membawa risiko penyakit.

f. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengendalian faktor risiko pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kapasitas petugas dalam menangani barang berisiko, meskipun saat ini tidak ditemukan kasus pada kategori tersebut.
- 2) Terciptanya lingkungan yang lebih aman dan higienis di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan.
- 3) Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam pengendalian faktor risiko, sehingga respons terhadap potensi risiko menjadi lebih cepat dan efektif.

g. Analisis keberhasilan

Keberhasilan pada tahun 2024 diukur berdasarkan:

- 1) Seluruh faktor risiko pada orang, alat angkut, dan lingkungan berhasil dikendalikan dengan capaian 100%.

- 2) Tidak adanya kasus jenazah dengan penyakit menular yang dikirim menunjukkan efektivitas pengawasan dan pengendalian risiko pada kategori barang.
- 3) Adanya peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan simulasi, yang menjadi indikator kesiapsiagaan terhadap potensi risiko di masa depan.
- 4) Penguatan koordinasi lintas sektor yang mendukung keberhasilan deteksi dan pengendalian faktor risiko di pintu masuk wilayah kerja BKK Kelas I Ambon.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN

a. Defenisi operasional

Indeks pengendalian faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN adalah nilai untuk mengetahui status factor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

b. Cara perhitungan

Hitung capaian 10 parameter, kemudian hasil hitungan dimasukkan dalam rumus indeks. 10 parameter yang dihitung adalah:

- 1) Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%,
- 2) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 ,
- 3) Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1),
- 4) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2 ,
- 5) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 ,
- 6) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0,
- 7) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 ,
- 8) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan,
- 9) Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan,

- 10) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis.

c. Upaya kegiatan

Upaya pengendalian dipintu masuk yang dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan pengamatan dan pemberantasan nyamuk *aedes aegypti* dan *anopheles* pada area perimeter dan buffer.
- 2) Pengendalian jentik nyamuk.
- 3) Pengukuran kepadatan lalat pada *Point of Entry*.
- 4) Melaksanakan pemasangan perangkap tikus dan identifikasi pinjal pada wilayah perimeter dan buffer di *Point of Entry*.
- 5) Pengukuran kepadatan kecoa pada *point of entry*.
- 6) Pemeriksaan Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat.
- 7) Pemeriksaan hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan.
- 8) Pemeriksaan kimia dan bakteriologis/mikrobiologis pada air bersih.
- 9) Jejaring kemitraan dengan stakeholder.
- 10) Diseminasi dan informasi mengenai wilayah bebas vektor pada *Point of Entry*.

d. Capaian indikator

Capaian indeks pengendalian faktor risiko dipintu masuk
pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN
Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Ambon
Tahun 2025

Parameter	Target 2025	Capaian											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	90	90	90	100	70	70	90	100	100	80	60	60	90
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	90	90	90	90	100	90	80	90	90	90	80	80	80
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat <2	90	80	80	50	50	50	40	50	50	60	50	60	50
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	80	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer <1	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	100	100	100	100	90	100	80	100	90	90	90	100	90
Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	90	80	80	80	70	70	70	70	80	70	80	70	80
Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	90	90	80	90	90	90	90	90	90	90	70	70	70
INDEKS		0,94	0,95	0,94	0,92	0,92	0,92	0,93	0,92	0,93	0,93	0,93	0,94

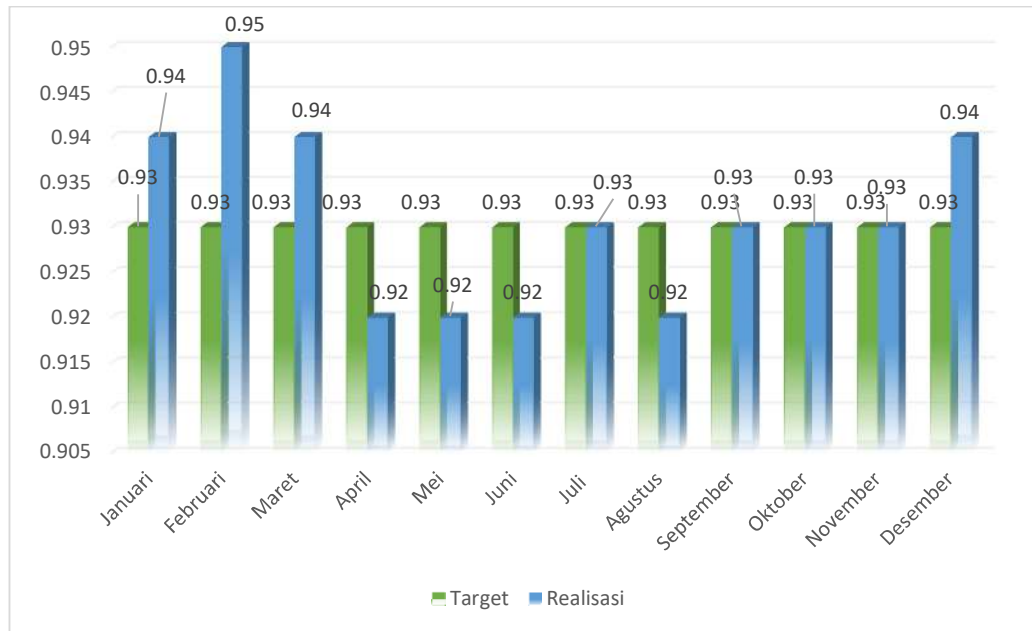
Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.4 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan Tahun 2025, capaian pengendalian faktor risiko menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase sinyal SKD KLB dan bencana yang direspons kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% berhasil mencapai target sebesar 100% setiap bulan sepanjang tahun. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan yang optimal dalam menangani situasi darurat kesehatan.
- 2) Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks pinjal ≤ 1 juga berhasil mencapai 100% setiap bulan, melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%. Hal ini mengindikasikan efektivitas upaya pengendalian vektor pinjal.
- 3) Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva *Anopheles* (<1) memiliki capaian yang fluktuatif. Target tercapai pada beberapa bulan, seperti Maret, Agustus, dan September, dengan nilai 100%, namun menurun hingga 60%-70% pada Mei, Juni, November, dan Desember. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti musim hujan memengaruhi keberadaan larva *Anopheles*.
- 4) Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa <2 menunjukkan pencapaian yang stabil, meskipun terdapat beberapa bulan (Juli, November, dan Desember) dengan nilai di bawah target sebesar 90%, yaitu 80%.
- 5) Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat <2 merupakan indikator dengan tantangan terbesar. Capaian pada beberapa bulan, seperti Mei, Juni, dan Desember, berada di bawah target dengan nilai terendah 40%-50%. Hal ini menunjukkan perlunya intensifikasi upaya pengendalian lalat di area pelabuhan dan bandara.
- 6) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 berhasil mencapai target 100% sepanjang tahun, menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan nyamuk di area perimeter wilayah kerja.

- 7) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer <1 juga konsisten mencapai 100% setiap bulan, mencerminkan efektivitas pengendalian nyamuk di area buffer.
- 8) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan sebagian besar mencapai target, kecuali pada bulan Mei (90%) dan Juli (80%), yang mengindikasikan perlunya penguatan upaya pemeriksaan sanitasi.
- 9) Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan menunjukkan capaian yang belum stabil, dengan beberapa bulan hanya mencapai 70%. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan terhadap hygiene pada TPM.
- 10) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan pemeriksaan lengkap menunjukkan tren yang serupa, dengan capaian terendah sebesar 70% pada November dan Desember.
- 11) Indeks Pengendalian Faktor Risiko secara keseluruhan stabil dengan nilai rata-rata antara 0,92 hingga 0,95 sepanjang tahun.
- 12) Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, khususnya dalam pengendalian populasi lalat, peningkatan hygiene TPM, dan kualitas air bersih di wilayah kerja BKK Kelas I Ambon.

**Grafik 3.8 Indeks pengendalian di Bandara/Pelabuhan/PLBDN
BKK Kelas I Ambon Tahun 2025**



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.8, terlihat perbandingan antara capaian indeks pengendalian di Bandara/Pelabuhan/PLBDN pada tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon.

Pada tahun 2025, capaian indeks pengendalian secara keseluruhan berada pada kisaran 0,92 hingga 0,95, dengan capaian rata-rata sebesar 0,93. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan, mencerminkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan pengendalian faktor risiko di pintu masuk.

Capaian ini menggambarkan keberhasilan penerapan strategi pengendalian, meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada beberapa bulan. Hasil ini memberikan optimisme bahwa program pengendalian yang dijalankan secara konsisten dapat terus mempertahankan dan meningkatkan capaian pada tahun-tahun mendatang.

Grafik 3.9 Indeks pengendalian di Bandara/Pelabuhan/PLBDN
BKK Kelas I Ambon Tahun 2020-2024



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.9, terlihat perkembangan capaian indeks pengendalian di Bandara/Pelabuhan/PLBDN Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon selama periode 2020–2024.

Pada tahun 2020, capaian realisasi sebesar 85%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan capaian realisasi menjadi 92%, melebihi target sebesar 90%. Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga 2024, capaian diukur menggunakan indeks dengan hasil 0,81 pada tahun 2022, 0,94 pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 0,94 pada tahun 2024.

Capaian ini mencerminkan adanya tren peningkatan kinerja dalam pengendalian faktor risiko di pintu masuk dari tahun ke tahun. Realisasi yang terus mendekati atau melampaui target menunjukkan keberhasilan implementasi strategi dan program pengendalian yang dilakukan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk mempertahankan kinerja di masa mendatang.

Grafik 3.10 Perbandingan Capaian Indeks pengendalian di Bandara/Pelabuhan/PLBDN Tahun 2024 dengan Target Tahun 2025
BKK Kelas I Ambon



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.10, terlihat perbandingan antara capaian Indeks Pengendalian di Bandara/Pelabuhan/PLBDN pada tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon.

Pada tahun 2025, capaian indeks pengendalian berada pada angka 0,94, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025 sebesar 0,93. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian faktor risiko di tahun 2025 telah mencapai hasil yang optimal, melampaui target yang direncanakan untuk tahun mendatang.

Capaian ini mencerminkan efektivitas upaya pengendalian yang telah dilaksanakan, serta adanya sinergi yang baik antara program yang dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Keberhasilan ini menjadi indikator positif bagi kinerja yang berkelanjutan, sekaligus memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian di tahun 2025.

e. Masalah

- 1) Masih terdapat lokasi perimeter yang sulit mencapai angka *house index* 0, terutama di wilayah kerja yang luas dan memiliki populasi vektor tinggi.

- 2) Masih terdapat lokasi perimeter yang memiliki indek populasi lalat <2
- 3) Keterbatasan jumlah tenaga ahli sanitasi lingkungan di beberapa wilayah kerja, yang menghambat optimalisasi pengendalian vektor.
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengendalian vektor, sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk masih rendah.

f. Pemecahan Masalah

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan edukasi dan penyebaran media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat di wilayah perimeter untuk meningkatkan kesadaran terhadap upaya pengendalian vektor.
- 2) Mengadakan pelatihan khusus bagi petugas di wilayah kerja terkait teknik pengendalian vektor, meskipun di luar disiplin ilmu yang dimiliki.
- 3) Pastikan semua bandara/pelabuhan mengukur indeks populasi lalat secara konsisten.
- 4) Memperkuat kolaborasi dengan lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan, lembaga lingkungan, dan komunitas lokal untuk mendukung upaya pengendalian vektor secara lebih komprehensif.
- 5) Menambah frekuensi inspeksi sanitasi lingkungan di wilayah kerja dengan tingkat risiko tinggi.

g. Manfaat

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian vektor melalui edukasi dan penyebaran informasi yang efektif.
- 2) Mengurangi potensi penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor di wilayah perimeter, seperti DBD, malaria, dan chikungunya.
- 3) Memperkuat kompetensi petugas di wilayah kerja untuk melaksanakan upaya pengendalian faktor risiko lingkungan dengan lebih efektif.

- 4) Meningkatkan kinerja dan capaian indikator pengendalian vektor di Bandara/Pelabuhan/PLBDN, sehingga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan aman.

h. Analisis keberhasilan

- 1) Keberhasilan diukur dari penurunan house index di wilayah perimeter menjadi ≤ 1 pada akhir tahun.
- 2) Peningkatan jumlah masyarakat yang teredukasi dan berpartisipasi aktif dalam PSN dan kegiatan pengendalian vektor.
- 3) Tercapainya indikator pengendalian di Bandara/Pelabuhan/PLBDN sesuai target, didukung oleh penerapan SOP dan kerja sama lintas program serta sektor.
- 4) Meningkatnya frekuensi kegiatan inspeksi sanitasi lingkungan dengan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
- 5) Adanya peningkatan jumlah petugas yang mampu melaksanakan kegiatan pengendalian faktor risiko secara mandiri setelah mengikuti pelatihan.

4. Nilai kinerja anggaran

a. Defenisi operasional

Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RVKK) dengan menggunakan formula rata geometric.

b. Cara perhitungan

Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan. Perhitungan ini berdasarkan realisasi volume keluaran, tiap bulannya pada menu dashboard e-monev DJA

c. Upaya kegiatan

Upaya kegiatan yang dilakukan pada indikator nilai kinerja anggaran adalah:

- 1) Persentase penyerapan anggaran
- 2) Nilai Konsistensi
- 3) Input Capaian Keluaran

- 4) Efisiensi Anggaran
- 5) Nilai EKA

d. Capaian indikator

Target indikator nilai kinerja anggaran adalah 90, realisasi capaian BKK Kelas I Ambon tahun 2025 dalam indikator ini adalah 98.12. Dengan begitu nilai realisasi capaian adalah 109,02%. Kegiatan yang dilakukan adalah :

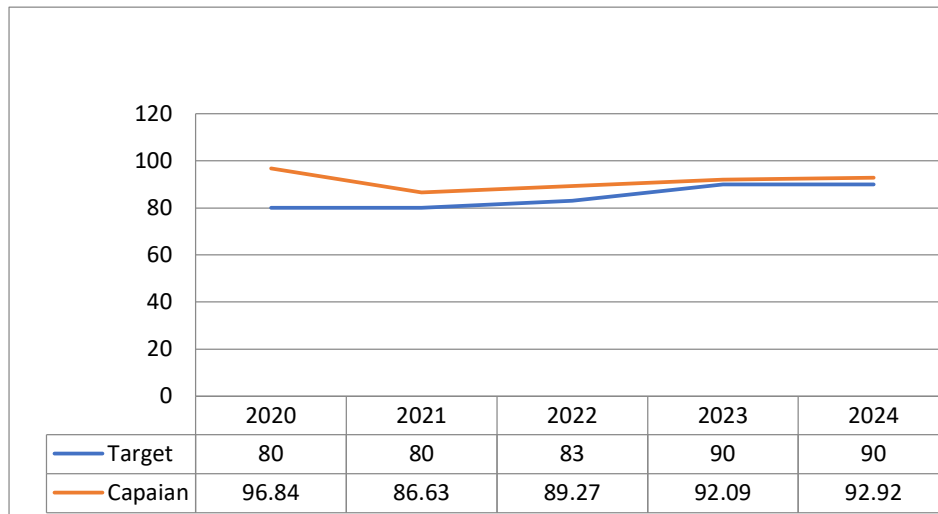
- 1) Melakukan input data realisasi capaian volume kegiatan
- 2) Melakukan input data indikator kinerja anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : 49,58

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran : 48,54



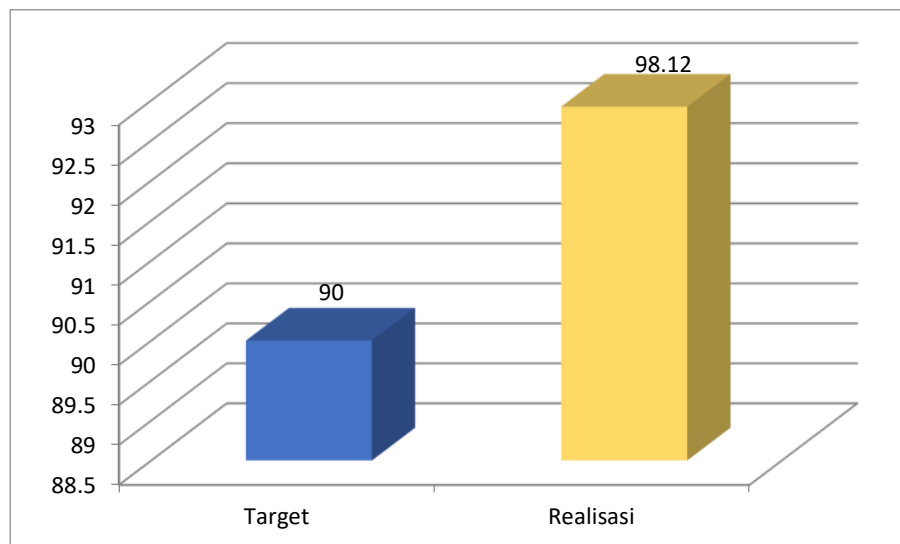
**Grafik 3.12 Nilai Kinerja Anggaran
BKK Kelas I Ambon Tahun 2020-2025**



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.12 capaian nilai kinerja anggaran tertinggi pada tahun 2020 dengan nilai 96,84 dan terendah pada Tahun 2021 dengan nilai 86,63

**Grafik 3.13 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran
Tahun 2024 dengan Target Tahun 2025
BKK Kelas I Ambon**



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.13 capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 diperoleh sebesar 98,12 nilai tersebut mencapai target yang direncanakan pada Tahun 2025.

e. Masalah

Masalah yang terjadi selama pelaksanaan tahun anggaran 2024 yaitu:

- 1) Pelatihan yang menggunakan dana PNBPN tidak dapat dilaksanakan diakhir tahun.
- 2) Adanya kebijakan efisiensi perjalanan dinas sebesar 50%

f. Pemecahan Masalah

- 1) Sebaiknya dalam perencanaan berikutnya pelatihan menggunakan sumber dana Rupiah Murni.

g. Manfaat

Manfaat dalam pengukuran nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. Penilaian merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian kinerja hasil pengukuran kedalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan program guna dianalisis lebih lanjut.

h. Analisis Keberhasilan

Terpenuhinya nilai kinerja anggaran berdasarkan indikator persentase pencapaian realisasi anggaran.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

a. Definisi operasional

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi.

b. Cara perhitungan

Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran berdasarkan nilai yang diperoleh tiap bulannya melalui kesesuaian perencanaan dengan

pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan anggaran serta efisiensi pelaksanaan kegiatan.

c. Upaya kegiatan

Upaya kegiatan yang dilakukan untuk indikator 5 adalah sebagai berikut:

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BKK Ambon pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) BKK Kelas I Ambon agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
- 2) BKK Kelas I Ambon agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.
- 3) BKK Kelas I Ambon yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman IV DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
- 4) BKK Kelas I Ambon lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai platform pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.
- 5) BKK Kelas I Ambon agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender sejak SP2D UP/GUP diterbitkan (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.
- 6) BKK Kelas I Ambon agar senantiasa meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian kedisiplinan, ketertiban, dan LPJ sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT.
- 7) BKK Kelas I Ambon agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak yakni maksimal 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan

- verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN
- 8) BKK Kelas I Ambon agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.
 - 9) BKK Kelas I Ambon agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif misalnya menyegarkan kegiatan yang dapat dilaksanakan segera.
 - 10)Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
 - 11) PPK BKK Kelas I Ambon agar senantiasa meningkatkan ketelitian atas kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/penerima pembayaran.
 - 12)Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.
 - 13) BKK Kelas I Ambon agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (SPM bersih > Rp 5 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.
 - 14) BKK Kelas I Ambon agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN.

- 15) Bila memiliki pagu minus agar dapat segera menyelesaikan pagu minus (6 digit akun) dengan mempersiapkan revisi anggaran untuk menutup pagu minus tersebut.
- 16) BKK Kelas I Ambon agar senantiasa memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana, menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran, dan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukkan pencairan anggaran pada akhir tahun
- 17) Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan.
- 18) Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap output yang dikelola.
- 19) Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output serta memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali (5% untuk output strategis, 20% untuk output lainnya).
- 20) Melakukan pengisian data capaian output secara akurat pada aplikasi SAS dan SAKTI secara disiplin setiap bulan.

d. Capaian indikator

Berikut capaian nilai indikator pelaksanaan anggaran BKK Kelas I Ambon:

Tabel 3.6 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon
Tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON

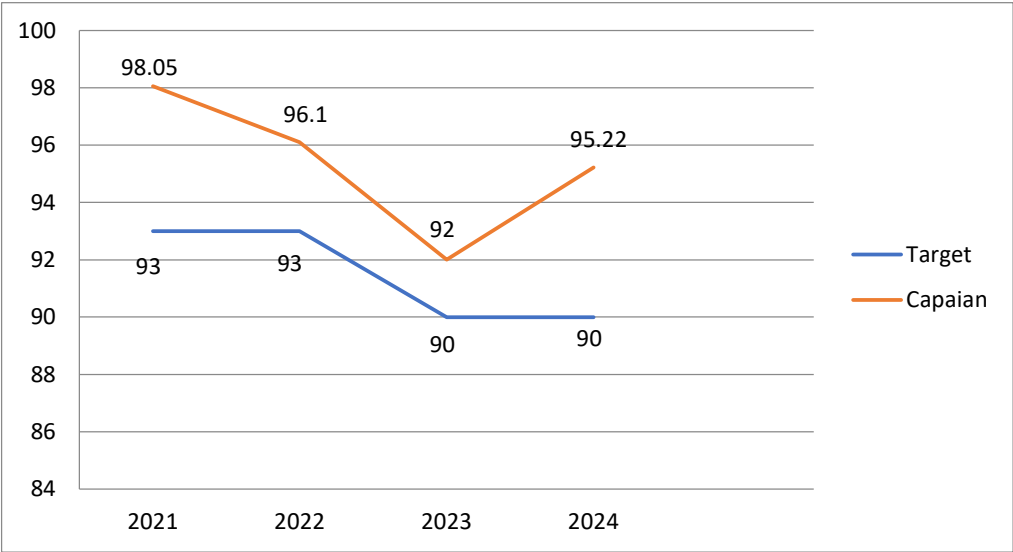
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	061	024	416010	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I AMBON	Nilai	100.00	77.35	94.62	100.00	100.00	98.44	99.38	95.22	100%	0.00	95.22
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.60	18.92	10.00	10.00	9.84	24.84				
					Nilai Aspek	88.68		98.27				99.38				

Berdasarkan tabel 3.6 nilai indikator pelaksanaan anggaran yang diperoleh tahun 2025 sebesar 98,12.

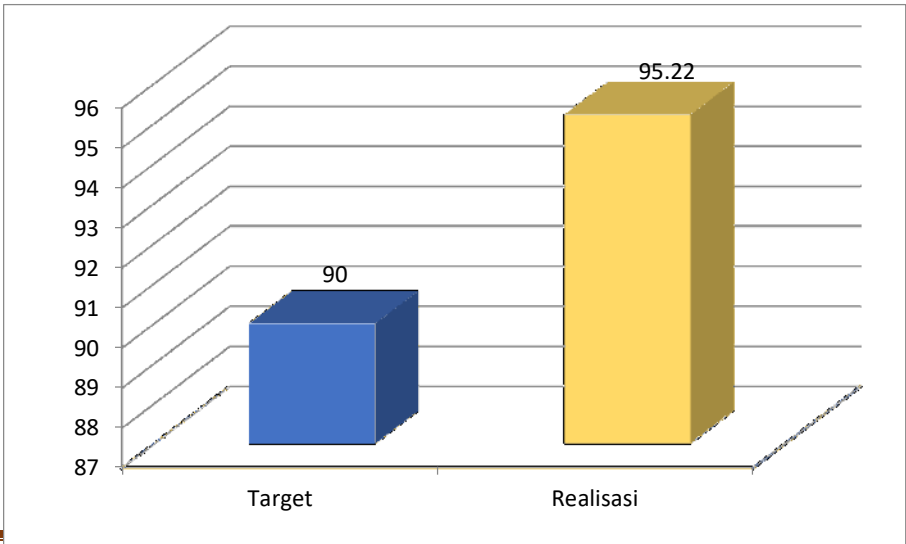
Grafik 3.14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
BKK Kelas I Ambon Tahun 2021-2025



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi diperoleh pada Tahun 2021 dengan nilai 98,05. Dalam 3 tahun terakhir nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) selalu melebihi target yang ditetapkan.

Grafik 3.15 Perbandingan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024
BKK Kelas I Ambon



Berdasarkan Grafik 3.15 Capaian Tahun 2024 telah melebihi dari Target yang direncanakan pada Tahun 2024.

e. Masalah

Beberapa masalah IKPA yang muncul :

- 1) Tidak profesionalnya Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
- 2) Kesalahan SPM yang diakibatkan kekurangtelitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.
- 3) Pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan RPD sehingga mempengaruhi Halaman III DIPA.
- 4) Realisasi anggaran pada capaian output tidak mencapai 100%

f. Pemecahan Masalah

Berikut pemecahan masalah yang bisa dilakukan:

- 1) Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan suratpernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/diseter.
- 2) agar teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP;
- 3) Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran wajib disesuaikan dengan Rencana Penarikan Dana.

g. Manfaat

Manfaat dari tingginya nilai IKPA akan berefek pada 3 hal yaitu

- 1) Kelancaran Pelaksanaan Anggaran
- 2) Mendukung Manajemen Kas
- 3) Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

h. Analisis keberhasilan

Keberhasilan dari indikator kinerja pelaksanaan anggaran oleh BKK Kelas I Ambon yang dukur berdasarkan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap relugasi, efektivitas pelaksaannya anggaran serta efisiensi pelaksanaan kegiatan,

dengan hasil 95,22%, sesuai dengan target kinerja yang diharapkan berdasarkan dukungan kegiatan serta pengelolaan anggaran APBN oleh satuan kerja BKK Kelas I Ambon.

6. Kinerja implementasi WBK satker

a. Defenisi operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBMM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

b. Cara perhitungan

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.

c. Upaya kegiatan

Upaya kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh nilai implementasi WBK adalah:

- 1) Melaksanakan penilalain oleh unit utama terhadap komponen pengungkit.
- 2) Melaksanakan penilalain oleh unit utama terhadap komponen hasil.

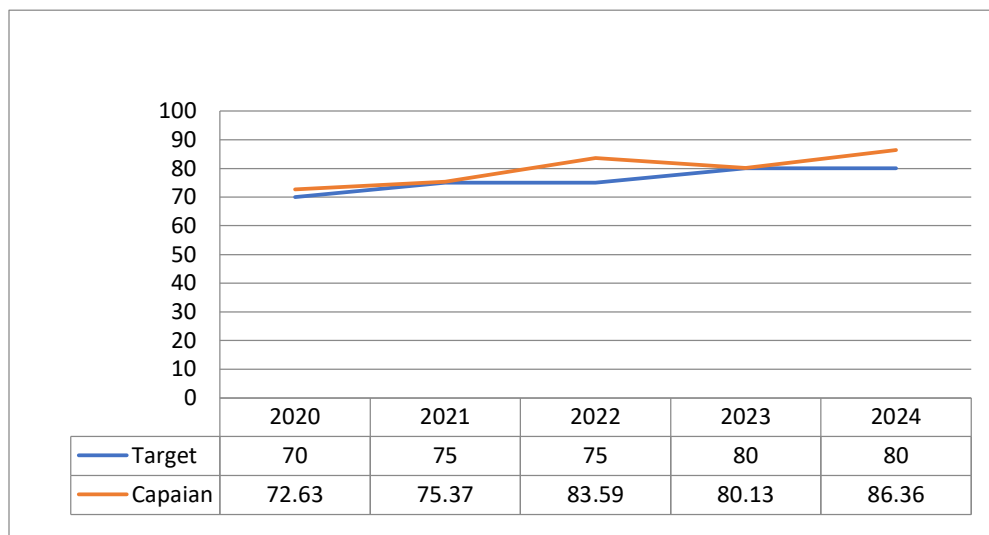
d. Capaian indikator

Tabel 3.7 Kinerja implementasi WBK satker Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Ambon
Tahun 2025

No.	MATERI	NILAI	REKOMENDASI PERBAIKAN
I	KOMPONEN PENGUNGKIT	58,16	
A.	Aspek Pemenuhan	29,27	
1	Manajemen Perubahan	4,00	Data sudah lengkap dari SK, Sosialisasi, role model pimpinan, SOP, evaluasi pimpinan juga sudah ada rencana tindak lanjut per triwulan semua agar dipertahankan. Reviu SKI dilengkapi.
2	Penataan Tatalaksana	3,50	Aspek Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama sudah dilaksanakan dengan baik, perlu upaya peningkatan aspek SPBE yaitu pemanfaatan teknologi informasi pada aspek pengukuran kinerja, fungsi PPID belum dilaksanakan secara optimal (informasi yang ditampilkan belum lengkap, perlu membuat form permohonan informasi)
3	Penataan Sistem manajemen SDM	4,70	
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	perlu melengkapi bukti keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan kinerja (dialog kinerja), pengukuran kinerja, dan notulen-notulen terkait kegiatan tersebut agar dapat memperlihatkan bukti bahwa pimpinan satker selaku pengambil keputusan tertinggi di satker memberikan arahan/instruksi
5	Penguatan Pengawasan	7,25	
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,82	Perlu ditambahkan dokumen perencanaan (TOR) atau RAB, SOP, laporan monev terkait dengan budaya pelayanan prima
B.	Aspek Reform	28,89	
1	Manajemen Perubahan	4,00	Agan Perubahan ada 3 dengan 13 inovasi terkait laporan perjadi, dokumen kesehatan online, pelaporan kinerja anggaran. untuk aplikasi sudah ada manual book untuk berbasis aplikasi. Diingatkan untuk persiapan inovasi 2025. Budaya kerja sudah disosialisasikan dan dievaluasi berkala dipertahankan.
2	Penataan Tatalaksana	3,00	belum ada roadmap peta jalan (rencana pengembangan) terhadap penggunaan teknologi informasi pada aspek pengukuran kinerja, administrasi internal organisasi, serta pelayanan publik
3	Penataan Sistem manajemen SDM	4,64	
4	Penguatan Akuntabilitas	4,75	satker agar melengkapi dokumen yang berupa mekanisme atas pelaksanaan pengukuran kinerja, dapat berupa SOP, Surat Edaran pengumpulan data
5	Penguatan Pengawasan	7,50	
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	
II	KOMPONEN HASIL	28,20	
1.	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	10,70	
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	9,45	
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	1,25	
2.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50	
	Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey eksternal)	17,50	
TOTAL NILAI		86,36	

Berdasarkan tabel 3.7 hasil penilaian WBK tahun 2024 yaitu 86,36 dimana target yang ditentukan adalah 80.

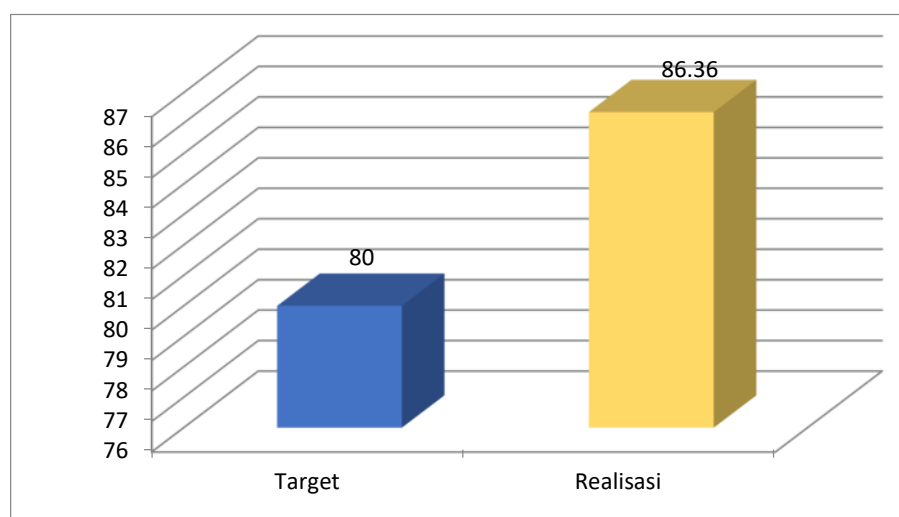
Grafik 3.16 Kinerja implementasi WBK satker
BKK Kelas I Ambon Tahun 2020-2024



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.16 capaian Kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2024 diperoleh nilai 86,36.

Grafik 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja implementasi WBK satker
Tahun 2024 dengan target Tahun 2024
BKK Kelas I Ambon



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.17 capaian Tahun 2024 masih tidak jauh berbeda dibandingkan dengan target yang direncanakan pada Tahun 2024. Perlu persiapan yang lebih baik, agar tidak hanya mencapai target pada Tahun 2024, tetapi juga bisa lolos WBK satker.

e. Masalah

Masih belum optimalnya Penilaian WBK pada Tahun 2024 dikarenakan :

- 1) Kurangnya pemahaman indikator dan kriteria WBK, sehingga implementasinya tidak sesuai dengan ekspektasi penilaian
- 2) Pengawasan internal terhadap pelaksanaan program WBK masih lemah
- 3) Tidak ada kebijakan atau komitmen pimpinan dalam rangka membangun zona integritas

f. Pemecahan Masalah

Belum diraihnya status WBK BKK Kelas I Ambon disebabkan masih rendahnya data dukung , oleh karena itu ada beberapa hal yang segera diperbaiki yaitu

- 1) Penyediaan modul atau buku panduan praktis yang berisi langkah-langkah implementasi setiap indikator
- 2) Rutin melakukan pertemuan untuk membangun semangat anti korupsi dan nilai integritas ASN BKK Kelas I Ambon
- 3) Menumbuhkembangkan nilai-nilai anti korupsi dan nilai integritas pada setiap kegiatan dan pertemuan internal BKK Kelas I Ambon
- 4) Menyusun program dan monitoring evaluasi setiap pokja.

g. Manfaat

Adapun manfaat pada indikator Kinerja implementasi WBK satker adalah:

- 1) Terselenggaranya Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 3) Terciptanya indikator manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan

kualitas pelayanan publik pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon.

h. Analisis keberhasilan

- 1) Terciptanya zona integritas di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon.
- 2) Kesamaan gerak dan langkah menuju zona integritas pada satuan kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon;
- 3) Tumbuhnya integritas pada setiap ASN di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

a. Defenisi operasional

Pegawai yang ditingkatkan kemampuannya sesuai kompetensinya melalui seminar, workshop, capacity building, on job training, dan lainnya.

b. Cara perhitungan

Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi dengan target pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas dikali seratus.

c. Upaya kegiatan

Meningkatkan kapasitas ASN pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon melalui pendidikan serta pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

d. Capaian indikator

Pada tahun 2025 capaian peningkatan kapasitas ASN sebesar 100,00% dari target 85%, dimana terdapat 60 ASN dengan jumlah JPL sebanyak > 20 yang mengikuti Pendidikan, pelatihan, workshop, dll, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.8 Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

BKK Kelas I Ambon Tahun 2025

NO	NAMA ASN	PENDIDIKAN		PELATIHAN KLASIKAL										PELATIHAN NON KLASIKAL										Jumlah Jam Pelajaran dalam Satu Tahun		
		Tugas Belajar	Ijin Belajar	Pelatihan Struktural/Diklat PIM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Sosial Kultural	Seminar/Konfrensi	Workshop/Lokakarya	Kursus	Penataran	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Coaching	Mentoring	eLearning	Pelatihan Jarak jauh	Datasering	Pembelajaran Alam Terbuka (Out Bond)	Patok Banding (Benchmarking)	Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta	Belajar Mandiri		Komunitas Belajar	Bimbingan di tempat kerja
1	AGUNG ARDYANTO, SKM., MPH															20										20
2	NAZIER TUASAMU, SKM, M.Kes (Epid)															152										152
3	drg. ANDI JUMIATI, M.Kes															20										20
4	BENNY YUDIHARTO SURIPATTY, S.Sos															63										63
5	dr. DEBORA WIDIANSA MAKING	40																								40
6	ZAKARIA DAHUNA, S.Sos															20										20
7	MUNIRA LAGUBE, AMKL., SKM															33										33
8	dr. JOHN STENLY HETHARIE	40														20										60
9	dr. ROHMAH SALEH															23										23
10	dr. MARGRETH TITA															20										20

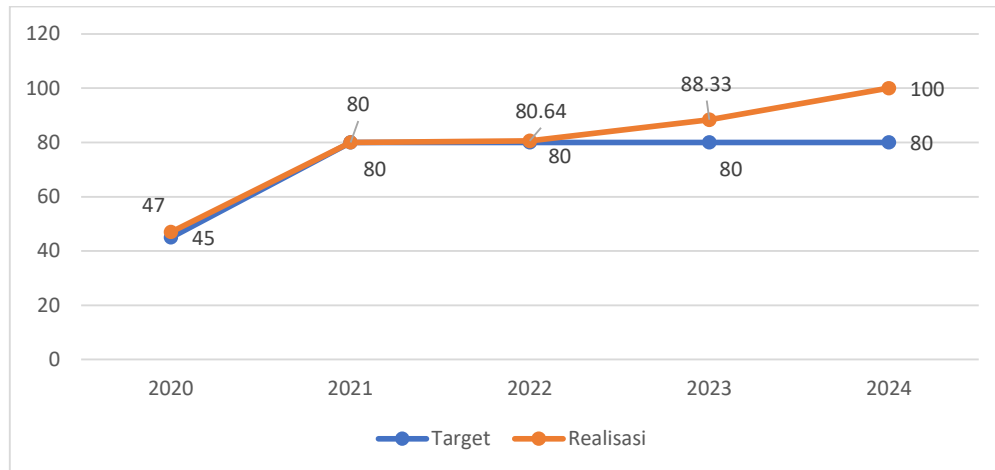
NO	NAMA ASN	PENDIDIKAN	PELATIHAN KLASIKAL												PELATIHAN NON KLASIKAL												Jumlah
11	RAMLY, SKM														20												20
12	RUDDY LA UNGA, SKM, M.K.M														23												23
13	DEDY WAHYUDI, AMKL														20												20
14	YOSEFINA WILHELMINA MARGI RAHAJAAN, AMKL														20												20
15	ANDI ROSMAWATI FIRDAUS RUSDI														63												63
16	ANDI SYAMSAINAL														20												20
17	RIDWAN MASI, SKM., M.Kes														33												33
18	JENA TUASIKAL, AMKL., SKM														20												20
19	ASMAWATI TUASIKAL, AMd Kep														20												20
20	HERNY LA UNGA, S.K.M														20												20
21	HARYATI MUNDJID, AMKL														20												20
22	PAULUS MARKUS ORAPLEAN, AMKL														20												20
23	AWALUDIN YUSRAN ELY, SKM														21												21
24	ABDUL LATIF LAHANGATUBUN														20												20
25	DJONI SIRURU, SE														20												20
26	LA ODE ISNAND MUHURUNA, S.Si														20												20
27	M. ZULDARISMAN, SKM														29												29
28	AZIS LA UDI, AMKL														20												20
29	ZACARIAS TAMTELAHITU, S.K.M														20												20
30	ISAK TASANE, SKM														20												20
31	ARYANTO MARSAOLY, A.MKL														380												380
32	BAINUDDIN SILLEHU, SKM														20												20
33	FRANLY PATTIPEILOHY, Amd														20												20
34	SUNITA ARIYANI MARUAPEY,														20												20

LAPORAN KINERJA BKK KELAS I AMBON
TAHUN 2025

NO	NAMA ASN	PENDIDIKAN		PELATIHAN KLASIKAL										PELATIHAN NON KLASIKAL										Jumlah		
	A.Md. Kep																									
35	RATNA MASI, SKM														20											20
36	VIONA MILANA DEASY LOURENS, SKM														81											81
37	SOFYAN, SKM														27											27
38	MUHAMMAD IKBAL, S.KM														20											20
39	RIKKY SUHANDA, SKM														225											225
40	FIRDAUS DUWILA, SKM														20											20
41	ISWADI PAYAPO, Amk														33											33
42	KARMILA N LADDUHERY, Amd														20											20
43	UMAR SUMARDI, S.Kep.														20											20
44	LUKMAN YADI KAMARUDIN, AMd.Kep														20											20
45	RAHMAT FEBRIANDI, S.Tr. KL														20											20
46	DIAN CHRISTINE MONICA SARIRA, SKM														60											60
47	CHENSYA KUMBANGSILA, SH														50											50
48	RIZAL RUSTAM, SKM														21											21
49	ALIYA LATUCONSINA, AMd.Kep														20											20
50	HERMIYANTI, AMd.KL														20											20
51	STELLA TAHYA, A.Md. Kep.														20											20
52	MARDIAH A, A.Md. Kep.														20											20
53	LAISINA STEVEN CHRISTY														20											20
54	JOHAN SOSELISA														20											20
55	HASAN KALDERAK														20											20
56	MUHAMAD SALEH KOSSO														20											20
57	FITRIWANTI, A.Md. Farm														35											35
58	NUR THAIBBAH TITAPUTTY,														33											33

NO	NAMA ASN	PENDIDIKAN	PELATIHAN KLASIKAL										PELATIHAN NON KLASIKAL										Jumlah		
	A.Md. AK																								
59	HAJAH RAHMAWATI													20											20
60	MEIYANTI KUSUMAWARNI, SKM													24											24

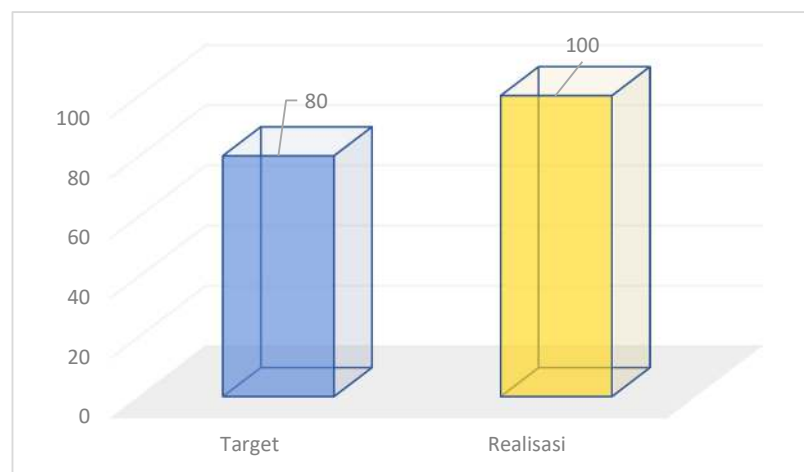
Grafik 3.20 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
BKK Kelas I Ambon Tahun 2020-2024



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.20 capaian tertinggi yang diperoleh selama 5 tahun, diperoleh pada tahun 2024 dengan nilai capaian 100%.

Grafik 3.21 Perbandingan Capaian Persentase ASN yang ditingkatkan
kompetensinya Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024
BKK Kelas I Ambon



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.21 capaian Tahun 2024 lebih dari pada target pada Tahun 2024, dengan capaian 100% sedangkan target pada Tahun 2024 sebesar 80%.

e. Masalah

Beberapa masalah yang muncul yang sangat memengaruhi indikator peningkatan kapasitas ASN adalah :

- 1) Mulai maraknya pelatihan Klasikal khusus pada pelatihan managerial/non teknis, sehingga mempengaruhi minat ASN yang fungsional dalam mengikuti pelatihan tersebut.
- 2) banyak Alokasi anggaran pelatihan bersumber PNBK, sementara realisasi pendapatan PNBK BKK Kelas I Ambon masih rendah, sehingga mempengaruhi capaian output dan jam pelatihan tiap ASN.

f. Pemecahan Masalah

Beberapa Pemecahan masalah yang dilakukan oleh BKK Kelas I Ambon antara lain :

- 1) ASN Lebih aktif lagi mencari pelatihan teknis dari sumber yang kredible.
- 2) Kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

g. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari indikator peningkatan kapasitas ASN tersebut, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga ASN Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon, dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- 2) Memberikan peluang kepada ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kapasitas dalam bekerja dan bertugas.

h. Analisis keberhasilan

- 1) Menyiapkan data serta alokasi anggaran bagi ASN yang belum mengikuti pendidikan serta pelatihan dibidangnya.
- 2) ASN aktif dalam mengikuti pendidikan serta pelatihan secara virtual, sehingga meminimalisir penurunan kualitas serta produktivitas ASN di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon.

8. Persentase Realisasi Anggaran

a. Defenisi operasional

Langkah strategis satuan kerja dalam rangka memenuhi target rencana penarikan dana untuk menjawab rencana pelaksanaan kegiatan dalam satuan waktu tahun anggaran berjalan.

b. Cara perhitungan

Realisasi persentase realisasi dibandingkan dengan pagu anggaran. Berdasarkan akumulasi capaian keluaran kegiatan dan realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar 88.69%, dimana perhitungan ini berdasarkan realisasi anggaran tiap waktunya pada menu dashboard sakti web.

c. Upaya kegiatan

Upaya kegiatan yang dilakukan pada indikator nilai Penyerapan anggraan adalah:

- 1) Memastikan kontrak Belanja Modal sudah diselesaikan dan dibayarkan
- 2) Memetakan pagu jenis belanja terbesar di satker dan memfokuskan penyerapan anggaran pada jenis belanja dimaksud;
- 3) Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai, khususnya untuk jatuh tempo termin kontrak;
- 4) Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai (SPM-GUP) jika sudah terpakai minimal 50%.

d. Capaian indikator

Tabel 3.8 Persentase Realisasi Anggaran

BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

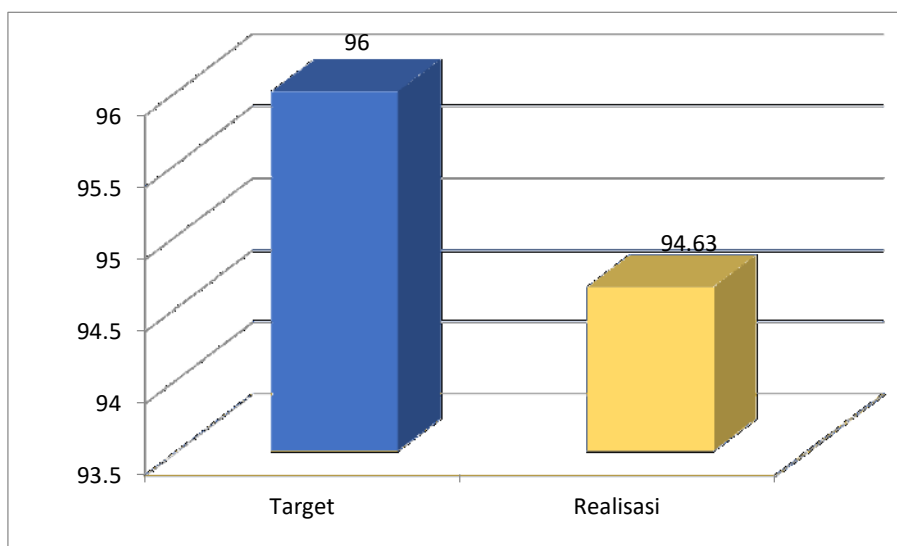
NO	Indikator	Target	Realisasi Anggaran
1	Persentase Realisasi Anggaran	96	94,63

Berdasarkan tabel 3.8 persentase relisasi anggaran yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 94,63%, dari target 96%.

Grafik 3.24 Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Anggaran

Tahun 2024 Dengan Target Tahun 2024

BKK Kelas I Ambon



Sumber Data BKK Kelas I Ambon Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.24 Capaian pada tahun 2024 dengan nilai 94,63 masih jauh dari target yang di tetapkan yaitu 96.

e. Masalah

Masalah yang terjadi selama pelaksanaan tahun anggaran 2024 yaitu:

- 1) Pelatihan yang menggunakan dana PNBP tidak dapat dilaksanakan diakhir tahun.

Hal-hal yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah pada indikator penyerapan anggaran yaitu :

- 1) Kegiatan pelatihan sebaik menggunakan dana bersumber rupiah murni

f. Manfaat

Manfaat dalam pengukuran nilai Penyerapan anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. Penilaian merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian Penyerapan kedalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan program guna dianalisis lebih lanjut.

g. Analisis Kegagalan

- 1) Kurang optimalnya penyerapan anggaran satker per triwulannya
- 2) Kualitas perencanaan yang kurang optimal.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang dikelola oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon dalam melaksanakan program-program kegiatan Tahun 2024 untuk mencapai target-target sasaran program tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon Tahun 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	2,717,777,000	2,467,780,924	90.80 %
4249.PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	289,000,000	283,809,812	98.20 %
4249.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	388,300,000	383,980,371	98.89 %

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
4249.QAA.011	Pelayanan kesehatan haji	226,600,000	222,617,314	98.24 %
4249.QAA.012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas	161,700,000	161,363,057	99.79 %
4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,188,765,000	1,134,604,874	95.44 %
4249.QAH.016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	75,948,000	64,399,000	84.79 %
4249.QAH.U01	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan	298,980,000	298,020,000	99.68 %
4249.QAH.U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	109,600,000	106,350,000	97.03 %
4249.QAH.U04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	83,970,000	83,440,000	99.37 %
4249.QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	57,792,000	56,919,374	98.49 %
4249.QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes	254,250,000	229,765,000	90.37 %
4249.QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	23,640,000	17,680,000	74.79 %
4249.QAH.U10	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	15,627,000	12,460,000	79.73 %
4249.QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	47,520,000	44,880,000	94.44 %
4249.QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	12,370,000	12,200,000	98.63 %
4249.QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	30,240,000	30,220,000	99.93 %
4249.QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	15,768,000	15,621,500	99.07 %
4249.QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	54,550,000	54,440,000	99.80 %

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
4249.QAH.U19	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan	105,600,000	105,300,000	99.72 %
4249.QAH.U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	2,910,000	2,910,000	100.00
4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	301,024,000	288,128,243	95.72 %
4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	450,088,000	278,421,624	61.86 %
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit		12,630,171,000	12,055,996,933	95.45 %
4815.AEA	Koordinasi	110,644,000	107,441,550	97.11 %
4815.AEA.501	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	11,806,000	11,738,580	99.43 %
4815.AEA.502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	13,096,000	12,651,620	96.61 %
4815.AEA.503	Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran	47,640,000	47,189,807	99.06 %
4815.AEA.504	Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi	13,096,000	12,092,320	92.34 %
4815.AEA.505	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum	25,006,000	23,769,223	95.05 %
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12,094,553,000	11,546,314,070	95.47 %
4815.EBA.956	Layanan BMN	58,370,000	56,913,503	97.50 %
4815.EBA.957	Layanan Hukum	8,220,000	200,000	2.43 %
4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	22,116,000	20,305,000	91.81 %
4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	57,580,000	49,792,500	86.48 %
4815.EBA.962	Layanan Umum	32,544,000	32,269,900	99.16 %
4815.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2,212,000	2,000,000	90.42 %
4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	11,913,511,000	11,384,833,167	95.56 %

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	103,530,000	91,948,862	88.81 %
4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	44,330,000	32,776,362	73.94 %
4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	59,200,000	59,172,500	99.95 %
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	321,444,000	310,292,451	96.53 %
4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	202,580,000	197,207,520	97.35 %
4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	47,304,000	46,695,959	98.71 %
4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	59,250,000	54,148,972	91.39 %
4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	12,310,000	12,240,000	99.43 %

Berdasarkan Tabel 3.9, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon telah mengelola anggaran secara optimal untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target di tahun 2024. Total anggaran yang dikelola dialokasikan untuk program pelayanan kekarantinaan, pengendalian faktor risiko, layanan manajemen, serta dukungan manajemen internal.

Realisasi anggaran pada program Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah mencapai Rp2.467.780.924 atau 90,80% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.717.777.000. Sub-kegiatan seperti pelayanan kesehatan haji (98,24%), pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (99,79%), dan layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (84,79%) menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, meskipun terdapat beberapa sub-kegiatan yang belum mencapai realisasi optimal, seperti layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (74,79%).

Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit mencakup alokasi anggaran sebesar

Rp12.630.171.000, dengan realisasi sebesar Rp12.055.996.933 atau 95,45%. Layanan dukungan manajemen internal (95,47%) menjadi salah satu sub-kegiatan dengan realisasi anggaran yang signifikan. Namun, terdapat sub-kegiatan seperti layanan hukum yang hanya mencapai realisasi sebesar 2,43%, menunjukkan perlunya evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan terkait.

Realisasi anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon pada tahun 2024 secara keseluruhan mencerminkan pengelolaan yang baik. Namun, terdapat beberapa sub-kegiatan yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, seperti layanan hukum dan layanan manajemen SDM internal. Upaya perbaikan ke depan diharapkan dapat lebih mendukung pencapaian target sasaran program di tahun mendatang.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Satker Setara

Berikut perbandingan realisasi kinerja BKK Kelas I Ambon dengan BKK Kelas I Ternate, BKK Kelas I Banjarmasin dan BKK Kelas I Gorontalo:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BKK AMBON		BKK TERNATE		BKK BANJARMASIN		BKK GORONTALO	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Bandara/Pelabuhan/ PLBDN dan Wilayah	1 Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/ PLBDN	0,93	0,98	0,95	0,97	0,97	0,99	0,93	0,98
		2 Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100	100	97	100	100	100	98	100
		3 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/ PLBDN	0,93	0,94	0,76	0,81	1,00	1,00	0,93	1,00
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Penanggulangan Penyakit	4 Nilai kinerja anggaran	90	92,92	87	92,54	88	87,24	87	89,04
		5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	95,22	90	96,29	94	99,47	93	99,63
		6 Kinerja implementasi WBK satker	80	86,36	77	80,94	75	89,29	76	94,28
		7 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85	100	80	100	90	100	80	100
		8 Persentase Realisasi Anggaran	96	94,63	95	95,23	96	98,28	96	98,99

D. Analisa Realisasi Kinerja dengan Satker Setara

1. Analisa Kinerja

a. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN

Target : Dari ketiga satker tersebut target tertinggi di BKK Banjarmasin, dengan target indeks 0,97, dan terendah BKK Ambon dan BKK Gorontalo dengan target indeks 0,93.

Realisasi : Dari hasil capaian, masing-masing satker memperoleh nilai indeks 0,98; 0,97; 0,99; dan 0,98

b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Target : untuk indikator ke dua, target tertinggi pada satker BKK Ambon dan BKK Banjarmasin sebesar 100 dan target terendah pada satker BKK Ternate sebesar 97.

Realisasi : keempat satker tercapai realisasi sesuai target yaitu 100.

c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandar.a/Pelabuhan/PLBDN

Target : Target tertinggi pada satker BKK Banjarmasin dengan nilai 1,00. Sedangkan terendah pada satker BKK ternate dengan nilai 0,76.

Realisasi : Realisasi tertinggi pada satker BKK Gorontalo dan Banjarmasin, dan terendah pada satker BKK Ternate.

d. Nilai kinerja anggaran

Target : target tertinggi pada indikator ini ada pada satker BKK Ambon, dan terendah pada satker BKK Ternate dan Gorontalo.

Realisasi Realisasi tertinggi pada satker BKK Ambon dan terendah pada BKK Banjarmasin dengan nilai 87,24.

e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Target : Target tertinggi pada satker BKK Ambon dan terendah pada BKK Ternate.

Realisasi : Realisasi tertinggi pada satker BKK Gorontalo dan terendah pada satker BKK Ambon.

f. Kinerja implementasi WBK satker

Target : Target satker BKK Ambon tertinggi dengan nilai 80. Dan terendah pada BKK Banjarmasin dengan nilai 75..

Realisasi : realisasi tertinggi pada satker BKK Gorontalo dan terendah pada satker BKK ternate..

g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Target : Target tertinggi BKK Banjarmasin dan terendah pada BKK Ternate dan Gorontalo

Realisasi : Dari ke-empat satker tersebut, semuanya mencapai target yaitu dengan nilai 100.

h. Persentase realisasi anggaran

Target : BKK Ambon, BKK Banjarmasin dan BKK Gorontalo memiliki target dengan nilai 96, sedangkan BKK Ternate hanya 95.

Realisasi : realisasi tertinggi yaitu pada satker BKK Gorontalo dengan nilai persentase realisasi anggaran sebesar 98,99% dan terendah pada satker BKK Ambon dengan nilai 94,63%

2. Analisa Efisiensi Anggaran

a. Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk Indikator 1, dari sisi penganggaran dapat diketahui bahwa Pagu Anggaran untuk Indikator 1 sebesar Rp.652.058.000 dengan realisasi sebesar Rp. 619.406.312, serta nilai capaian output sebesar 105,38%. berikut hasil kami paparkan perhitungan nilai Efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

Berdasarkan rumus diatas dapat kita hitung :

$$E = \frac{(652.058.000 \times 105,38\%) - 619.406.312}{(652.058.000 \times 105,38\%)} \times 100\%$$

$$E = 9,86\%$$

Dari hasil diatas, dapat kita hitung Nilai Efisiensinya dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{9,86}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 74,64\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka didapatkan bahwa Nilai Efisiensi pada indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN sebesar 74,64%

- b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk Indikator 2, dari sisi penganggaran dapat diketahui bahwa Pagu Anggaran untuk Indikator 2 sebesar Rp.2.717.777.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.467.780.924, serta nilai capaian output sebesar 90,80%. berikut hasil kami paparkan perhitungan nilai Efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

Berdasarkan rumus diatas dapat kita hitung :

$$E = \frac{(2.717.777.000 \times 100\%) - 2.467.780.924}{(2.717.777.000 \times 100\%)} \times 100$$

$$E = 9,20\%$$

Dari hasil diatas, dapat kita hitung Nilai Efisiensinya dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{9,20}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 73,00\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka didapatkan bahwa Nilai Efisiensi pada indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 73,00%.

c. Indeks pengendalian di pintu masuk negara

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk Indikator 3, dari sisi penganggaran dapat diketahui bahwa Pagu Anggaran untuk Indikator 3 sebesar Rp.771.157.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 744.568.374,- serta nilai capaian output sebesar 101,08%. berikut hasil kami paparkan perhitungan nilai Efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Berdasarkan rumus diatas dapat kita hitung :

$$E = \frac{(771.157.000 \times 101,08\%) - 744568374}{(771.157.000 \times 101,08\%)} \times 100$$

$$E = 4,48\%$$

Dari hasil diatas, dapat kita hitung Nilai Efisiensinya dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi
E : Efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{4,48}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 61,20\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka didapatkan bahwa Nilai Efisiensi pada indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara sebesar 61,20%.

d. Nilai Kinerja Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk Indikator 4, dari sisi penganggaran dapat diketahui bahwa Pagu Anggaran untuk Indikator 4 sebesar Rp.15.347.948.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 14.523.777.857,- serta nilai capaian output sebesar 100,23%. berikut

hasil kami paparkan perhitungan nilai Efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

Berdasarkan rumus diatas dapat kita hitung :

$$E = \frac{(15.347.948.000 \times 102,24\%) - 14.523.777.857}{(15.347.948.000 \times 102,24\%)} \times 100$$

$$E = 7,44\%$$

Dari hasil diatas, dapat kita hitung Nilai Efisiensinya dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi
E : Efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{7,44}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 68,61\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka didapatkan bahwa Nilai Efisiensi pada indikator Nilai Kinerja Anggaran sebesar 68,61%.

e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk Indikator 5, dari sisi penganggaran dapat diketahui bahwa Pagu Anggaran untuk Indikator 5 sebesar Rp.15.347.948.000.- dengan realisasi sebesar Rp.

14.523.777.857,- serta nilai capaian output sebesar 100,23%. berikut hasil kami paparkan perhitungan nilai Efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Berdasarkan rumus diatas dapat kita hitung :

$$E = \frac{(15.347.948.000 \times 102,23\%) - 14.523.777.857}{(15.347.948.000 \times 102,23\%)} \times 100$$

$$E = 5,59\%$$

Dari hasil diatas, dapat kita hitung Nilai Efisiensinya dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{5,59}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 63,97\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka didapatkan bahwa Nilai Efisiensi pada indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 63,97%.

f. Kinerja Implementasi WBK Satker

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk Indikator 6, dari sisi penganggaran dapat diketahui bahwa Pagu Anggaran untuk Indikator 6 sebesar Rp.82.986.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 74.124.820,- serta nilai capaian output sebesar 107,95%. berikut hasil kami paparkan perhitungan nilai Efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Berdasarkan rumus diatas dapat kita hitung :

$$E = \frac{(82.986.000 \times 107,95\%) - 74.124.820}{(82.986.000 \times 107,95\%)} \times 100$$

$$E = 17,26\%$$

Dari hasil diatas, dapat kita hitung Nilai Efisiensinya dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{17,26}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 93,14\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka didapatkan bahwa Nilai Efisiensi pada indikator Kinerja Implementasi WBK Satker sebesar 93,14%.

g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk Indikator 7, dari sisi penganggaran dapat diketahui bahwa Pagu Anggaran untuk Indikator 7 sebesar Rp.128.536.000.- dengan realisasi sebesar Rp.115.718.085,- serta nilai capaian output sebesar 117,65%. berikut hasil kami paparkan perhitungan nilai Efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

Berdasarkan rumus diatas dapat kita hitung :

$$E = \frac{(128.536.000 \times 117,65\%) - 115.718.085}{(128.536.000 \times 117,65\%)} \times 100$$

$$E = 23,48\%$$

Dari hasil diatas, dapat kita hitung Nilai Efisiensinya dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{23,48}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 108,70\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka didapatkan bahwa Nilai Efisiensi pada indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya sebesar 108,70%.

h. Persentase Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk Indikator 8, dari sisi penganggaran dapat diketahui bahwa Pagu Anggaran untuk Indikator 8 sebesar Rp.15.347.948.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 14.523.777.857,- serta nilai capaian output sebesar 98,57%. berikut hasil kami paparkan perhitungan nilai Efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

Berdasarkan rumus diatas dapat kita hitung :

$$E = \frac{(15.347.948.000 \times 98,57\%) - 14.523.777.857}{(15.347.948.000 \times 98,57\%)} \times 100$$

$$E = 4,00\%$$

Dari hasil diatas, dapat kita hitung Nilai Efisiensinya dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi
E : Efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{4,00}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 59,99\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka didapatkan bahwa Nilai Efisiensi pada indikator Persentase Realisasi Anggaran sebesar 59,99%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.
2. Tahun 2025 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon telah menetapkan sebanyak 8 indikator kinerja.
3. Secara keseluruhan, capaian kinerja untuk semua indikator menunjukkan hasil yang sangat positif. Sebagian besar indikator melampaui target yang telah ditetapkan, menandakan pelaksanaan program dan anggaran dilakukan secara efisien, efektif, dan berkualitas.
4. Realisasi anggaran BKK Kelas I Ambon adalah 80.3% dari target 96%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya beberapa pelatihan yang tidak dapat diikuti.

B. Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut perbaikan pada tahun yang akan datang, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, dan melakukan revisi DIPA secara efektif.
2. Menganalisa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi anggaran
3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan di awal tahun anggaran untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun